

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
(022.12.2900.288127)**



**LAPORAN KEUANGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020
TAHUN ANGGARAN 2020
(AUDITED)**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tangerang, 30 April 2021
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG



ASRI SANTOSA, S.T., S.Si.T., M.T.
NIP. 19710706 199301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Ruang Lingkup	2
BAB II LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAP	3
I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	3
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	3
2. NERACA.....	3
3. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	3
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	4
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK).....	4
6. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL).....	4
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	5
III. NERACA	6
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	7
V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	8
VI. LAPORAN ARUS KAS (LAK)	9
VII. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)...	11
VIII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
A. PENJELASAN UMUM.....	12
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR PPI CURUG.....	12
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	13
A.3. BASIS AKUNTANSI.....	13
A.4. DASAR PENGUKURAN	14
A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	14

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	22
B.1 Pendapatan.....	22
B.2 Belanja.....	22
B.3 Belanja Pegawai.....	25
B.4 Belanja Barang.....	26
B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28
B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	28
B.7 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	28
B.8 Belanja Modal BLU.....	29
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA.....	30
ASET LANCAR	30
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	30
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	30
C.3. Kas pada Badan Layanan Umum.....	30
C.4. Piutang Bukan Pajak	32
C.5. Piutang dari kegiatan operasional BLU	32
C.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan operasional BLU	34
C.7. Persediaan	35
ASET TETAP.....	35
C.8. Peralatan dan Mesin	35
C.9. Gedung dan Bangunan	36
C.10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37
C.11. Aset Tetap Lainnya	37
C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	38
C.13. Aset Tak Berwujud	38
C.14. Aset Lain Lain	39
C.15. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	39
KEWAJIBAN	39
C.16. Utang kepada Pihak Ketiga	39
C.17. Pendapatan Diterima di Muka	39

C.18. Uang Muka dari KPPN.....	39
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL... 40	
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	40
D.2. Beban Pegawai	40
D.3. Beban Persediaan	41
D.4. Beban Barang dan Jasa	42
D.5. Beban Pemeliharaan	43
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	43
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	45
D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	45
D.9. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional.....	45
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 46	
E.1. Ekuitas Awal.....	46
E.2. Surplus (Defisit) LO.....	46
E.3. Penyesuaian Nilai Aset	46
E.4. Koreksi Nilai Persediaan.....	46
E.5. Koreksi atas Reklasifikasi.....	46
E.6. Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	46
E.7. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	46
E.8. Koreksi Lain-Lain	47
E.9. Ekuitas Akhir	47
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 48	
F.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	48
F.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi.....	51
F.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	52
F.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.....	52
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 53	
G.1. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	53
G.2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) .	53
G.3. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN.....	53

G.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah Penyesuaian.....	53
G.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	53
H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	54
H.1 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA	54
H.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN.....	54
BAB III ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	56
A. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	56
1. Analisis Horisontal /Analisis Dinamis	56
2. Analisis Vertikal/ Analisis Statis.....	60
B. ANALISIS RASIO KEUANGAN	60
1. Rasio Likuiditas	61
2. Rasio Utang (Leverage Ratio).....	62
3. Rasio POBO.....	63
4. Rasio Kemandirian	64
5. Rasio Efektifitas.....	64
6. Rasio Serapan Anggaran	65
BAB IV PENUTUP.....	66



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JL. RAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp. (021) 598-2203/04/05
Fax. (021) 598-2234

email : ppi@ppicurug.ac.id
website : <http://www.ppicurug.ac.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tangerang, 30 April 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

ASRI SANTOSA, S.T., S.Si.T., M.T.

NIP. 19710706 199301 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan dari pembentukan BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Landasan hukum tentang BLU terdapat di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada BAB XII tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum pasal 68 dan pasal 69. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengembangan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), memberikan peluang bagi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug untuk lebih meningkatkan layanan jasa pendidikan pelayaran dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, dengan tetap mengedepankan pelayanan prima kepada pengguna jasa.

Satker yang mengusulkan menerapkan PK BLU mewajibkan menyusun Laporan Keuangan Pokok tahun terakhir, yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug mengajukan pengusulan untuk menerapkan PK BLU dengan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

II. Ruang Lingkup

Laporan Keuangan Pokok ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdiri dari :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Laporan Keuangan Berdasarkan SAP
- BAB III : Analisa Laporan Keuangan
- BAB IV : Penutup

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahunan Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp62.229.611.597.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp186.552.011.167 atau mencapai 90,46 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp206.231.638.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.271.265.015.695 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 99.379.805.881, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.126.850.852.869, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp45.034.356.945.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.964.392.525 dan Rp1.269.300.271.170.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode

sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp197.859.838.498, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp315.797.317.051 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp117.937.478.553) Kegiatan Non Operasional terdiri atas Defisit Penjualan Aset (Rp3.336.885.356) dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp2.393.132.274, sehingga Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp988.618.362). Entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp118.926.096.915).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp1.388.882.632.173, dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp118.926.096.915), kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah ekuitas senilai Rp1.029.295.183 dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.685.559.271 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp1.269.300.271.170.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan. Saldo awal kas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp6.985.553.683 Arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris masing-masing adalah sebesar Rp228.343.315; Rp66.166.666, Rp0, (Rp916.075.600). Sehingga saldo akhir kas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp6.363.988.064.

6. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tanggal pelaporan dibandingkan Tahun sebelumnya. Saldo Anggaran lebih (SAL AWAL) adalah sebesar Rp5.987.777.083. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran setelah penyesuaian adalah sebesar Rp294.509.981; sehingga Saldo Anggaran Lebih pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.282.287.064.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN	REALISASI	% thd Angg	REALISASI 2019
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan PNBP Lainnya		-	857,248,874	-	246,550,681
Pendapatan Badan Layanan Umum		-	61,372,362,723	-	105,025,870,162
Pendapatan jasa layanan dari umum		-	38,731,709,650	-	61,598,418,746
Pendapatan hibah		-	-	-	-
Pendapatan hasil kerjasama		-	14,022,099,500	-	28,384,953,898
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas		-	4,383,965,309	-	9,793,531,414
Pendapatan BLU lainnya		-	4,234,588,264	-	5,248,966,104
Jumlah Pendapatan		-	62,229,611,597	#DIV/0!	105,272,420,843
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.3	19,343,460,000	18,768,679,077	97.03	27,469,322,324
Belanja Barang	B.4	186,888,178,000	167,783,332,090	89.78	254,089,379,744
Bunga		-	-	-	-
Belanja Lain-lain		-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		206,231,638,000	186,552,011,167	90.46	281,558,702,068
BELANJA MODAL					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5	-	-	-	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.6	-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.7	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
Belanja Modal BLU	B.8	-	-	-	2,353,882,580
Jumlah Belanja Modal		-	-	-	2,353,882,580
Jumlah Belanja		206,231,638,000	186,552,011,167	90.46	283,912,584,648
SURPLUS / (DEFISIT)		-	(124,322,399,570)	-	(178,640,163,805)
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri		-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
SILPA / (SIKPA)		-	(124,322,399,570)	-	(178,640,163,805)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG NERACA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	81,701,000	997,776,600
Kas pada Badan Layanan Umum	C.3	6,282,287,064	5,987,777,083
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		-	-
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.5	13,963,431,100	2,950,113,750
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.6	(1,843,575,628)	(1,189,007,056)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)		12,119,855,472	1,761,106,694
Persediaan	C.7	80,895,610,345	74,870,292,204
JUMLAH ASET LANCAR		99,379,453,881	83,616,952,581
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.8	2,518,564,270,529	2,521,795,945,679
Gedung dan Bangunan	C.9	380,404,636,398	377,210,781,398
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.10	23,492,912,534	21,393,087,534
Aset Tetap Lainnya	C.11	31,390,846,829	31,512,511,829
Akumulasi Penyusutan	C.12	(1,827,001,813,421)	(1,688,818,166,149)
Jumlah Aset Tetap		1,126,850,852,869	1,263,094,160,291
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.13	34,246,757,192	34,246,757,192
Aset Lain-lain	C.14	19,855,525,000	17,270,341,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(9,067,925,247)	(8,053,571,746)
Jumlah Aset Lainnya		45,034,356,945	43,463,526,446
JUMLAH ASET		1,271,264,663,695	1,390,174,639,318
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	1,964,392,525	1,292,007,145
Uang Muka dari KPPN	C.17	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1,964,392,525	1,292,007,145
JUMLAH KEWAJIBAN		1,964,392,525	1,292,007,145
EKUITAS			
Ekuitas		1,269,300,271,170	1,388,882,632,173
JUMLAH EKUITAS		1,269,300,271,170	1,388,882,632,173
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,271,264,663,695	1,390,174,639,318

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
	D.1		
Pendapatan Alokasi APBN		125,474,158,425	182,376,536,249
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		47,174,726,000	61,200,225,621
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain		4,383,965,309	9,793,531,414
Pendapatan Hibah BLU		-	393,000,000
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU		16,592,400,500	18,530,070,948
Pendapatan BLU Lainnya		4,234,588,264	5,248,966,104
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		197,859,838,498	277,542,330,336
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	37,218,406,936	46,497,334,991
Beban Persediaan	D.3	12,701,992,601	20,480,363,453
Beban Barang dan Jasa	D.4	101,135,295,521	153,621,243,606
Beban Pemeliharaan	D.5	20,658,380,845	45,522,290,166
Beban Perjalanan Dinas	D.6	8,360,887,241	10,385,184,920
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	135,067,785,335	173,670,640,814
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	654,568,572	(851,171,630)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		315,797,317,051	449,325,886,320
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(117,937,478,553)	(171,783,555,984)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		66,166,666	22,666,666
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(3,403,052,022)	(1,023,540,639)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		4,440,143,977	4,574,997,898
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		(2,091,876,983)	(2,372,776,142)
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	(988,618,362)	1,201,347,783
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(118,926,096,915)	(170,582,208,201)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(118,926,096,915)	(170,582,208,201)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	1,388,882,632,173	1,500,715,320,360
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(118,926,096,915)	(170,582,208,201)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		1,029,295,183	62,146,204,824
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	(24,333,000)	(2,902,013,847)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		2,406,543,000	37,316,738,648
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.6	(1,352,914,817)	27,731,480,023
KOREKSI LAIN-LAIN	E.7	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		(1,685,559,271)	(3,396,684,810)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(119,582,361,003)	(111,832,688,187)
EKUITAS AKHIR		1,269,300,271,170	1,388,882,632,173

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. LAPORAN ARUS KAS

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
ARUS MASUK KAS			
Pendapatan dari Alokasi APBN		125,474,158,425	182,376,536,249
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat		38,731,709,650	61,598,418,746
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain		4,383,965,309	9,793,531,414
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama		14,022,099,500	28,384,953,898
Pendapatan dari Hibah		-	-
Pendapatan Usaha Lainnya		4,234,588,264	5,248,966,104
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL		-	-
Pendapatan PNBPN Umum		791,082,208	223,884,015
JUMLAH ARUS MASUK KAS		187,637,603,356	287,626,290,426
ARUS KELUAR KAS			
Pembayaran Pegawai		36,408,920,530	46,731,936,004
Pembayaran Barang		73,616,439,997	117,347,799,768
Pembayaran Jasa		12,917,108,571	25,025,888,091
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan		9,392,070,000	17,356,674,407
Pembayaran Pemeliharaan		31,302,363,863	52,173,755,988
Pembayaran Perjalanan Dinas		8,360,887,241	10,385,184,920
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU		14,554,220,965	12,537,462,890
Pembayaran Bantuan Sosial		-	-
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		-	-
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara		857,248,874	246,550,681
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		187,409,260,041	281,805,252,749
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		228,343,315	5,821,037,677
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
ARUS MASUK KAS			
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	22,666,666
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya		66,166,666	-
JUMLAH ARUS MASUK KAS		66,166,666	22,666,666
ARUS KELUAR KAS			
Perolehan atas Peralatan dan Mesin		-	1,818,216,000
Perolehan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya		-	535,666,580
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		-	2,353,882,580
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		66,166,666	(2,331,215,914)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara		-	-
JUMLAH ARUS MASUK KAS		-	-
ARUS KELUAR KAS			
Penyetoran ke Kas Negara		-	-
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		1,201,479,070	7,293,720,600
JUMLAH ARUS MASUK KAS		1,201,479,070	7,293,720,600
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		2,117,554,670	7,264,600,500
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		2,117,554,670	7,264,600,500
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(916,075,600)	29,120,100
KENAIKAN/PENURUNAN KAS		(621,565,619)	3,518,941,863
Penyesuaian atas Selisih Kurs		-	-
Saldo Awal Kas		6,985,553,683	3,466,611,820
Koreksi Saldo Kas		-	-
SALDO AKHIR KAS		6,363,988,064	6,985,553,683
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :			
Saldo Akhir Kas pada BLU		6,282,287,064	5,987,777,083
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas		81,701,000	997,776,600
Investasi Jangka Pendek BLU		-	-
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU		-	-
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya		-	-
Jumlah Rincian Saldo		6,363,988,064	6,985,553,683
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :			
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)		-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

VI. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	G.1	5,987,777,083	2,497,955,320
Penggunaan SAL		-	-
Sub Total		5,987,777,083	2,497,955,320
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	G.2	(124,322,399,570)	(178,640,163,805)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA		-	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN :	G.3	124,616,909,551	182,129,985,568
Pendapatan Alokasi APBN		125,474,158,425	182,376,536,249
Penyetoran PNBK Ke Kas Negara		(857,248,874)	(246,550,681)
Penyetoran Surplus BLU Ke Kas Negara		-	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	G.4	294,509,981	3,489,821,763
Sub Total		6,282,287,064	5,987,777,083
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-Lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	G.5	6,282,287,064	5,987,777,083

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Politeknik
Penerbangan
Indonesia Curug

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPI Curug) merupakan instansi pendidikan pemerintah dibawah Kementerian Perhubungan yang bertugas menyiapkan SDM Perhubungan melalui jalur pendidikan dan pelatihan.

Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan PLP Curug – Curug, Legok, Tangerang, Banten.

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug didirikan dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang transportasi udara, guna memenuhi kebutuhan SDM dibidang penerbangan PPI Curug secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas *output*-nya guna mendukung pengembangan profesionalisme SDM dibidang penerbangan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Politeknik Penerbangan Indonesia Curug berkomitmen dengan visi ***“Menghasilkan lulusan yang diakui secara nasional dan internasional untuk menuju pusat unggulan yang berstandar internasional.”*** Sedangkan misi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ***“Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian teknologi penerapan di bidang penerbangan dalam rangka mencerdaskan bangsa dengan membangun sumber daya manusia (SDM) penerbangan yang memiliki iman dan taqwa, berkualitas internasional mampu bersaing, mandiri dan profesional”***. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: Mengedepankan prinsip-prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, kemandirian, integritas dan partisipasi) dalam setiap kegiatannya;

- Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan setiap pengajar yang berstatus PNS dalam berbagai diklat, workshop atau

seminar yang sesuai kompetensinya, baik dalam negeri maupun luar negeri;

- Pengembangan kreativitas dan inovasi program diklat berbasis kompetensi;
- Berorientasi pada keberhasilan program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan penerbangan;
- Peningkatan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di bidang penerbangan;
- Peningkatan pengelolaan sumber daya diklat;
- Aktif mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan teknologi;
- Bekerja keras dan penuh tanggung jawab berdasarkan sistem yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **Politeknik Penerbangan Indonesia Curug**. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan **Politeknik Penerbangan Indonesia Curug** dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh **Politeknik Penerbangan Indonesia Curug**. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan **Politeknik Penerbangan Indonesia Curug** adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: **69/PMK.06/2014** tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo. (Umur Piutang 0 s.d. 90 hari)	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. (Umur Piutang 91 s.d. 180 hari)	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan. (Umur Piutang 181 s.d. 360 hari)	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN. (Umur Piutang lebih dari 360 hari)	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas

sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp62.229.611.597

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp62.229.611.597. Pendapatan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Badan Layanan Umum	-	61,372,362,723	-
Pendapatan PNBP Lainnya	-	857,248,874	-
Jumlah	-	62,229,611,597	-

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Badan Layanan Umum	61,372,362,723	105,025,870,162	(41.56)
Pendapatan PNBP Lainnya	857,248,874	246,550,681	247.70
Jumlah	62,229,611,597	105,272,420,843	(40.89)

Realisasi pendapatan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp105.272.420.843. Namun pada tanggal 31 Desember 2020, realisasi pendapatan hanya sebesar Rp62.229.611.597. Jika secara persentase dibandingkan dengan tahun lalu, terdapat penurunan pendapatan sebesar 40,89%. Penyebab paling krusial dalam penurunan pendapatan tersebut adalah sejumlah diklat yang pelaksanaannya dibatalkan karena pandemi COVID-19.

Realisasi Belanja
Negara
Rp. 186.552.011.167

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. Rp.186.552.011.167 atau 90,46% dari anggaran belanja sebesar Rp206.231.638.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 2020 adalah sebagai berikut:

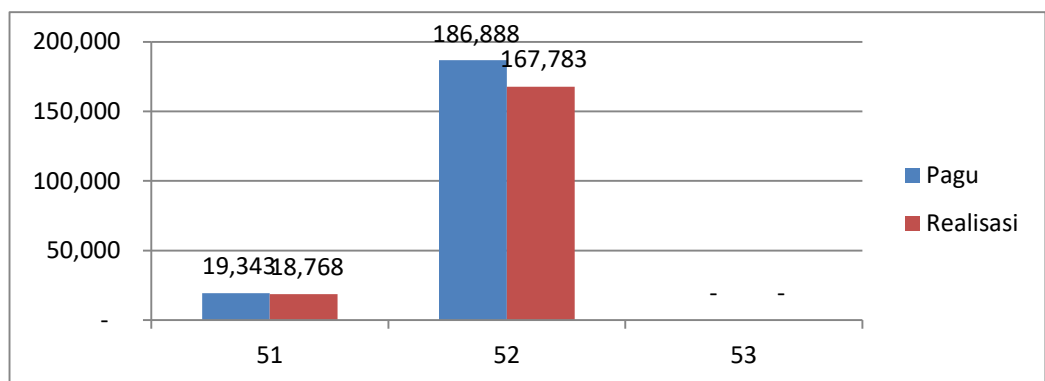
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	19,343,460,000	18,768,679,077	97.03
Belanja Barang	186,888,178,000	167,783,332,090	89.78
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	206,231,638,000	186,552,011,167	90.46

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2018

URAIAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	18,768,679,077	27,469,322,324	(31.67)
Belanja Barang	167,783,332,090	254,089,379,744	(33.97)
Belanja Modal	-	2,353,882,580	(100.00)
Jumlah	186,552,011,167	283,912,584,648	(34.29)

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 34,29% dibandingkan realisasi belanja tahun 2019. Persentase tersebut merupakan jumlah dari belanja pegawai dan belanja barang. Belanja Pegawai dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 31,67% dikarenakan penghentian pembayaran tunjangan kinerja pada bulan Mei 2019 dan digantikan dengan pembayaran remunerasi yang bersumber dari dana BLU. Pada belanja barang terjadi penurunan sebesar 33,97% disebabkan karena adanya pemotongan anggaran yang menyebabkan penurunan pagu belanja serta beberapa diklat yang penyelenggaraannya dibatalkan sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir.

Pada tahun 2019, ada instruksi bahwa efisiensi belanja modal, sehingga efeknya ajuan belanja modal yang semula diusulkan pada pagu kebutuhan tidak banyak disetujui, hanya belanja modal bersumber BLU saja. Sedangkan pada tahun 2020, mengingat saldo awal dan dana anggaran BLU yg menipis serta adanya penerapan remunerasi, sehingga belanja modal tahun 2020 diusulkan dibebankan ke Rupiah Murni, tapi

adanya COVID-19 Belanja Modal di tahun 2020 dihapus. Adanya pemotongan pada pertengahan tahun mengakibatkan belanja modal tersebut tidak dapat terealisasi. Selama periode Tahun Anggaran 2020, output strategis yang telah dicapai oleh Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sebagai berikut:

No	Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan	Target Keluaran Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	3998.001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi Udara	53,678,800,000	52,850,171,260	98.46%	1764	1761
2	3998.002	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi Udara	120,330,000	120,330,000	100.00%	24	24
3	3998.003	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi Udara	64,476,446,000	56,427,950,742	87.52%	1565	862
4	3998.004	Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SDM Transportasi Udara	4,928,070,000	4,841,376,418	98.24%	1460	1160
5	3998.005	Pengelolaan Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat	121,920,000	121,565,620	99.71%	2	2
6	3998.006	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	820,500,000	807,835,196	98.46%	20	20
7	3998.007	Penelitian Bidang Transportasi	1,233,108,000	1,233,083,100	100.00%	15	5
8	3998.008	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	390,707,000	390,675,721	99.99%	4	4
9	3998.009	Evaluasi Pasca Diklat	111,300,000	111,270,000	99.97%	4	4
10	3998.010	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	719,160,000	718,305,045	99.88%	6	5
11	3998.012	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat	964,000,000	963,973,199	100.00%	3	3
12	3998.013	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	367,480,000	367,475,000	100.00%	3	3
13	3998.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	5,580,945,000	5,578,129,747	99.95%	1	1
14	3998.994	Layanan Perkantoran	72,718,872,000	62,043,658,757	85.32%	1	1

*Belanja Pegawai
Rp18.768.679.077*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp18.768.679.077 dan Rp27.469.322.324. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 2020 mengalami penurunan sebesar 31,67% persen dari 2019. Hal ini disebabkan karena penghentian pembayaran tunjangan kinerja mulai bulan Mei 2019 digantikan dengan pembayaran Remunerasi.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	11,581,585,380	12,713,549,360	(8.90)
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	(12,888,300)	(7,819,200)	64.83
Belanja Pembulatan Gaji PNS	166,592	214,835	(22.46)
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(5,706)	(19,312)	(70.45)
Belanja Tunj. Suami/istri PNS	931,213,330	1,050,936,720	(11.39)
Pengembalian Belanja Tunj. Suami/istri PNS	(832,450)	(781,920)	6.46
Belanja Tunj. Anak PNS	214,536,428	233,101,308	(7.96)
Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	(184,910)	(290,004)	(36.24)
Belanja Tunj. Struktural PNS	132,040,000	149,710,000	(11.80)
Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	(370,000)	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	842,095,000	787,445,000	6.94
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	(750,000)	-
Belanja Tunj. PPh PNS	49,404,203	59,254,583	(16.62)
Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	(108,350)	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	532,938,780	587,008,920	(9.21)
Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	(434,520)	(579,360)	(25.00)
Belanja Uang Makan PNS	1,840,289,050	1,833,714,000	0.36
Belanja Tunj. Umum PNS	306,640,000	371,650,000	(17.49)
Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS	(6,105,050)	-	-
Belanja Tunj. Profesi Dosen	1,929,546,020	1,575,458,900	22.48
Pengembalian Belanja Tunj. Profesi Dosen	(1,857,420)	-	-
Belanja Uang Lembur	431,011,000	232,320,000	85.52
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	-	7,885,198,494	(100.00)
Jumlah	18,768,679,077	27,469,322,324	(31.67)

Belanja Barang

Rp167.783.332.090

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp167.783.332.090 dan Rp254.089.379.744. Realisasi Belanja Barang 2020 mengalami penurunan sebesar 33,97% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang 2019 karena adanya pemotongan anggaran akibat pandemi.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	59,152,698,509	88,995,891,493	(33.53)
Belanja Jasa	10,402,889,075	10,057,122,982	3.44
Belanja Pemeliharaan	29,506,394,163	47,310,401,588	(37.63)
Belanja Perjalanan Dinas	7,643,497,601	8,543,797,862	(10.54)
Belanja BLU	61,077,852,742	99,182,165,819	(38.42)
- Belanja Gaji dan Tunjangan	17,640,241,453	19,262,613,680	(8.42)
- Belanja Barang	22,498,498,488	44,474,518,202	(49.41)
- Belanja Jasa	2,514,219,496	14,968,765,109	(83.20)
- Belanja Pemeliharaan	1,795,969,700	4,863,354,400	(63.07)
- Belanja Perjalanan	717,389,640	1,841,387,058	(61.04)
- Belanja Ketersediaan Layanan BLU	165,044,900	-	-
- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	14,389,176,065	12,537,462,890	14.77
- Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU	1,357,313,000	1,234,064,480	9.99
Jumlah Belanja	167,783,332,090	254,089,379,744	(33.97)

Berdasarkan ketentuan pasal 6 PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tanggal 18 April 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program dalam penanganan pandemi COVID-19, pengalokasian dana penanganan COVID-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19. Adapun detil belanja terkait COVID-19 adalah sebagai berikut:

No.	Akun Belanja	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.280.000.000	1.273.492.000	6.508.000
2	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	366.250.000	366.250.000	-
3	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	560.000.000	560.000.000	-
4	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	790.460.000	790.460.000	-
6	525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	3.448.815.000	3.280.050.000	168.765.000
Total			6.445.525.000	6.270.252.000	175.273.000

Belanja Barang Non Operasional adalah pembelian masker, faceshield, alkohol, sabun cuci tangan, handsanitaizer, dan pembelian konsumsi untuk tim gugus tugas COVID-19. Belanja Persediaan adalah pembelian alat uji rapid tes di unit kesehatan. Yang termasuk belanja jasa adalah pengadaan kegiatan rapid tes dan swab tes untuk pegawai dan taruna. Sedangkan yang termasuk Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan adalah pembuatan *sink* cuci tangan di area

perkantoran dan area kegiatan belajar mengajar taruna. Belanja Barang BLU adalah pemberian bantuan swab untuk taruna yang melaksanakan kegiatan OJT di berbagai daerah, dan bantuan pendidikan berupa pengembalian biaya pendidikan untuk biaya uang makan yang telah dibayarkan taruna.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp0

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0. Tidak ada Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2020 dan 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Peralatan	-	-	-
KDP	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0. Tidak ada Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2020 dan 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Gedung Pendidikan	-	-	-
KDP	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	100.00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0

B.7 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Jaringan	-	-	-
KDP	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.8 Belanja Modal Badan Layanan Umum

Belanja Modal Badan Layanan Umum per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp2.353.882.580.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Peratan dan Mesin	-	1,818,216,000	-
Modal Lainnya	-	535,666,580	-
Jumlah Belanja	-	2,353,882,580	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang telah dipertanggungjawabkan atau telah disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo di Rekening Bendahara Pengeluaran BLU dengan nomor rekening 1760000874022 sebesar Rp0, selisih antara saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan rekening koran adalah belanja yang belum dipertanggungjawabkan.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp81.701.000

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp81.701.000 dan Rp997.776.600.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan dan pengeluaran Badan Layanan Umum yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	2020	2019
Uang Tunai		
Bank Mandiri RPL 127 BLU STPI untuk PKD - 1760200102117		
Bank Mandiri RPL 127 STPI untuk Dana Kelolaan - 1760000874071		
BNI RPL 127 STPI untuk Dana Kelolaan BLU - 2312201542	81,701,000	997,776,600
Bank Mandiri RPL 127 STPI untuk Operasional Penerimaan 1760000874055		
Jumlah	81,701,000	997,776,600

Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp81,701,000 merupakan Pendapatan Diterima di Muka yang belum diketahui pengirimnya.

Kas pada Badan
Layanan Umum
Rp6.282.287.064

C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.282.287.064 dan Rp5.987.777.083.

Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari dana Badan Layanan Umum yang telah disahkan kepada negara melalui SP2B dan berada direkening Operasional Penerimaan BLU No. Acc 1760000874055.

Sampai dengan 31 Desember 2020 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug memiliki beberapa rekening yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran dana kas, dengan rincian sebagai berikut:

- Rekening Dana Kelolaan BLU PT Bank BNI (Persero), Tbk dengan nama RPL 127 STPI untuk Dana Kelola BLU dengan nomor rekening 2312201542.
- Rekening Dana Kelolaan BLU PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nama RPL 127 STPI untuk Dana Kelolaan BLU dengan nomor rekening 1760000874071.
- Rekening Dana Kelolaan BLU PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nama RPL 127 STPI untuk Operasional Penerimaan BLU dengan nomor rekening 1760000874055.
- Rekening Operasional Belanja BLU PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nama RPL 127 STPI untuk Operasional Belanja BLU dengan nomor rekening 1760000874030.

Selain Rekening untuk penerimaan dan pengeluaran kas, PPI Curug juga memiliki rekening Deposito yaitu:

- Rekening Deposito di Bank BNI RPL 127 BLU STPI untuk PKD dengan nomor rekening 0830750628
- Rekening Deposito di Bank BTN RPL 127 BLU STPI untuk PKD dengan nomor rekening 00043.01.40.011058.6

Beberapa Rekening yang telah ditutup adalah;

- Rekening Deposito di Bank Mandiri RPL 127 BLU STPI untuk PKD dengan nomor rekening 176-02-0013705-5. Rekening Deposito ini telah ditutup pada tanggal 25 Februari 2020.
- Rekening Giro Valas USD PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nama RPL 127 BLU STPI untuk OPS P dalam USD dengan nomor rekening 1760001146727. Rekening ini ditutup pada tanggal 26 Maret 2020.

Deposito di Bank BNI merupakan jenis deposito berjangka waktu tiga bulan, sedangkan deposito di Bank BTN merupakan jenis deposito berjangka waktu satu bulan.

Rincian Kas pada Badan Layanan Umum pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas pada Badan Layanan Umum

Jenis	2020	2019
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk - Rek. 1760000874055	1,991,384,031	1,138,408,090
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk - Rek. 1760000874071	77,277,674	670,333,620
PT Bank BNI (Persero), Tbk - Rek. 2312201542	119,257,774	84,667,788
Deposito Bank BTN	2,596,412,263	2,596,412,263
Deposito Bank BNI	1,497,955,322	1,497,955,322
Jumlah	6,282,287,064	5,987,777,083

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TH 2020	TH 2019
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Rp13.963.431.100

C.5 Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp13.963.431.100 dan Rp2.950.113.750. Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum merupakan piutang yang berasal dari jasa layanan Badan Layanan Umum namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Uraian	2020	2019
Piutang Pelayanan Pendidikan		
- Jurusan Teknik Penerbangan (687 orang)	84,700,000	583,783,750
- Jurusan Manajemen Penerbangan (176 orang)	7,650,879,600	100,952,500
- Jurusan Keselamatan Penerbangan (377 orang)	1,328,590,500	189,967,500
- Jurusan Penerbang (51 orang)	616,500,000	362,950,000
Jumlah Piutang Pelayanan Pendidikan	9,680,670,100	1,237,653,750
Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya		
- Angkasa Pura Support	1,079,675,000	935,500,000
- JATC	811,656,000	453,656,000
- Flybest Flight Academy	640,500,000	-
- Brunei Darussalam	386,750,000	-
- PT Smart Cakrawala Aviation	358,100,000	
Panca Jiwa Manunggal	350,000,000	
- LKP YUMA	205,200,000	205,200,000
- PT Angkasa Pura Solusi	154,080,000	-
- PT Angkasa Pura 2	102,600,000	
- Garuda Maintenance Facility Aero Asia	98,000,000	-
- Debrata Kumar Ghosh	50,000,000	
- PT. Building and Plant Safety Institute	46,200,000	46,200,000
- BBTMC BPPT		71,904,000
Jumlah Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	4,282,761,000	1,712,460,000
Jumlah Piutang dari kegiatan Operasional BLU	13,963,431,100	2,950,113,750

Data saldo Piutang awal tahun 2020 sebesar Rp2.950.113.750 terdapat penambahan piutang sebesar Rp64.324.605.951 dan pengurangan sebesar Rp51.455.137.101. Rincian Mutasi Piutang adalah sebagai berikut

Mutasi Piutang

NO	Klasifikasi Piutang	Saldo Awal 31 Desember 2019 Audited	Penambahan Piutang 2020	Pelunasan atas Piutang 2020	Pelunasan atas Piutang 2019	Saldo per 31 Desember 2020
1	PIUTANG BLU PELAYANAN PENDIDIKAN	1,237,653,750	46,214,102,000	36,922,338,150	848,747,500	9,680,670,100
	PENERBANG	362,950,000	2,115,900,000	2,073,000,000	321,150,000	84,700,000
	TEKNIK PENERBANG	583,783,750	28,148,314,500	20,754,303,650	326,915,000	7,650,879,600
	KESELAMATAN PENERBANG	189,967,500	10,243,585,000	9,005,232,000	99,730,000	1,328,590,500
	MANAJEMEN PENERBANG	100,952,500	5,706,302,500	5,089,802,500	100,952,500	616,500,000
2	PIUTANG BLU PENYEDIA BARANG DAN JASA LAINNYA	1,712,460,000	18,110,503,951	14,532,798,951	1,007,404,000	4,282,761,000
	JATC	453,656,000	358,000,000			811,656,000
	BBTMC BPPT	71,904,000			71,904,000	-
	FLYBEST	-	696,500,000	56,000,000		640,500,000
	ANGKASA PURA LOGISTIK	-	92,150,000	92,150,000		-
	BUILDING PLANT SAFETY	46,200,000				46,200,000
	BRUNEI DARUSSALAM	-	386,750,000			386,750,000
	ANGKASA PURA SUPPORT	935,500,000	2,132,055,000	1,052,380,000	935,500,000	1,079,675,000
	LKP YUMA	205,200,000				205,200,000
	PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA	-	103,600,000	5,600,000		98,000,000
	PEMBINAAN PUSAT PENERBANGAN ANGKATAN DARAT	-	534,862,000	534,862,000		-
	ANGKASA PURA 2		384,600,000	282,000,000		102,600,000
	ANGKASA PURA I		1,081,381,000	1,081,381,000		-
	ANGKASA PURA SOLUSI		3,603,080,000	3,449,000,000		154,080,000
	SAYAP GARUDA INDAH		19,500,000	19,500,000		-
	GARUDA INDONESIA		900,000,000	900,000,000		-
	LPPNPI		137,600,000	137,600,000		-
	TNI AU		3,702,000,000	3,702,000,000		-
	DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA		92,546,000	92,546,000		-
	Debrata Kumar Ghosh		109,231,500	59,231,500		50,000,000
	DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN		1,363,332,451	1,363,332,451		-
	DINAS PENGEMBANGAN OPERASI TNI AU		469,311,000	469,311,000		-
	PT SMART CAKRAWALA AVIATION		486,200,000	128,100,000		358,100,000
	Biro SDM dan Organisasi BP Batam		58,560,000	58,560,000		-
	Panca Jiwa Manunggal		350,000,000			350,000,000
	Bina Tenaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		505,740,000	505,740,000		-
	Pusat Teknologi Penerbangan (LAPAN)		543,505,000	543,505,000		-
	PPSDMPU		98,300,000	98,300,000		-
	Jumlah	2,950,113,750	64,324,605,951	51,455,137,101	1,856,151,500	13,963,431,100

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Rp1.843.575.628)

C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp1.843.575.628) dan (Rp1.189.007.056). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Layanan Pendidikan

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang dari kegiatan Operasional BLU			
Lancar (0 s.d. 90 hari)	9,041,170,600	0.5%	45,205,853
Kurang Lancar (91 s.d. 180 hari)	363,495,000	10%	36,349,500
Diragukan (181 s.d 360 hari)	-	50%	-
Macet (lebih dari 360 hari)	276,004,500	100%	276,004,500
Jumlah	9,680,670,100		357,559,853

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Kerja Sama

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang dari kegiatan Operasional BLU			
Lancar (0 s.d. 90 hari)	1,956,955,000	0.5%	9,784,775
Kurang Lancar (91 s.d. 180 hari)	98,000,000	10%	9,800,000
Diragukan (181 s.d 360 hari)	1,522,750,000	50%	761,375,000
Macet (lebih dari 360 hari)	705,056,000	100%	705,056,000
Jumlah	4,282,761,000		1,486,015,775

Rincian Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Jenis Piutang	Piutang	Penyisihan	Piutang Bersih
Piutang Layanan Pendidikan	9,680,670,100	357,559,853	9,323,110,247
Piutang Kerja Sama	4,282,761,000	1,486,015,775	2,796,745,225
Jumlah	13,963,431,100	1,843,575,628	12,119,855,472

Persediaan
Rp80.895.610.345

C.7 Persediaan

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp80.895.610.345 dan Rp74.870.292.204. Rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis	2020	2019
1	Barang Konsumsi	11,883,600	38,499,000
2	Bahan untuk Pemeliharaan	875,000	3,559,000
3	Suku Cadang	75,732,527,432	69,371,353,329
4	Bahan Baku	4,623,807,035	5,002,318,082
5	Persediaan Lainnya	526,517,278	454,562,793
	Jumlah	80,895,610,345	74,870,292,204

Peralatan dan Mesin
Rp2.518.564.270.529

C.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp2.518.564.270.529 dan Rp2.521.795.945.679. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	2,521,795,945,679
Mutasi tambah:	7,331,221,350
Pembelian	652,532,500
Reklasifikasi	
Pengembangan Nilai Aset	199,750,000
Koreksi Aset	
Hibah	
Transfer Masuk	6,478,938,850
Normalisasi BMN	-
Mutasi kurang:	10,562,896,500
Penghentian Aset dari Penggunaan	827,518,000
Transfer Keluar	9,735,378,500
Saldo per 31 Desember 2020	2,518,564,270,529
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	1,787,647,791,430
Nilai Buku per 31 Desember 2020	730,916,479,099

Transfer masuk peralatan dan mesin berasal dari BP3 Curug sebesar Rp132.138.850 dan Balai Kesehatan Penerbangan sebesar Rp6.346.800.000. Transfer Keluar berupa Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Torak, 1 unit senilai Rp4.325.331.000 ke Kantor UPBU Budiarto, 2 unit senilai Rp5.410.047.500 ke Kantor UPBU Kalimantan.

*Gedung dan Bangunan
Rp380.404.636.398*

C.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp380.404.636.398 dan Rp377.210.781.398. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	377,210,781,398
Mutasi tambah:	6,413,529,000
Pembelian	199,290,000
Reklasifikasi	
Koreksi Aset	1,137,399,000
Transfer Masuk	5,076,840,000
Mutasi kurang:	3,219,674,000
Transfer Keluar	-
Koreksi Pencaatatan	1,462,008,000
Penghentian Aset dari Penggunaan	1,757,666,000
Saldo per 31 Desember 2020	380,404,636,398
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	31,169,980,745
Nilai Buku per 31 Desember 2020	349,234,655,653

Transfer masuk gedung dan bangunan sebesar Rp5.076.840.000 berupa asrama Rast dari BP3 Curug.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp23.492.912.534

C.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp23.492.912.534 dan Rp21,393,087,534. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	21,393,087,534
Mutasi tambah:	2,099,825,000
Pembelian	
Reklasifikasi Masuk	121,665,000
Koreksi Aset	1,269,144,000
Transfer Masuk	709,016,000
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	
Saldo per 31 Desember 2020	23,492,912,534
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	8,084,431,246
Nilai Buku per 31 Desember 2020	31,577,343,780

Transfer masuk sebesar Rp709.016.000 adalah Jalan Khusus Kompleks dari BP3 Curug.

Aset Tetap Lainnya
Rp31.390.846.829

C.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp31.390.846.829 dan Rp31.512.511.829. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	31,512,511,829
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Reklasifikasi	-
Koreksi Aset	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	121,665,000
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	121,665,000
Saldo per 30 September 2020	31,390,846,829
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	(111,776,500)
Nilai Buku per 30 September 2020	31,279,070,329

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp1.827.001.813.421)

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing (Rp1.827.001.813.421) dan (Rp1.688.818.166.149). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Layanan Umum merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Layanan Umum per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai BMN	Akumulasi Penyusutan	Nilai Netto
1	Peralatan dan Mesin	2,518,564,270,529	1,787,647,791,430	730,916,479,099
2	Gedung dan Bangunan	380,404,636,398	31,169,980,745	349,234,655,653
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23,492,912,534	8,084,431,246	15,408,481,288
4	Aset Tetap Lainnya	31,390,846,829	99,610,000	31,291,236,829
Jumlah		2,953,852,666,290	1,827,001,813,421	1,126,850,852,869

Aset Tak Berwujud
Rp34.246.757.192

C.13 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp34.246.757.192 dan Rp34.246.757.192.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

No	Jenis	2020	2019
1	Hak Cipta	31,247,000	31,247,000
2	Software	17,133,985,300	17,133,985,300
3	Lisensi	3,200,000	3,200,000
4	Hasil Kajian/Penelitian	4,238,430,047	4,238,430,047
5	Aset Tak Berwujud Lainnya	12,839,894,845	12,839,894,845
Jumlah		34,246,757,192	34,246,757,192

Aset Lain-lain
Rp19.855.525.000

C.14 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp19.855.525.000 dan Rp17.270.341.000. Aset Lain-Lain terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp9.632.565.000, Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah sebesar Rp10.222.960.000.

Rincian Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	7,047,381,000
Mutasi tambah:	2,585,184,000
Pembelian	-
Reklasifikasi	2,585,184,000
Koreksi Aset	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi	
Usulan Barang Rusak Berat	
Saldo per 30 September 2020	9,632,565,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	(5,580,062,100)
Nilai Buku per 30 September 2020	4,052,502,900

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp9.067.925.247)

C.15 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah (Rp9.067.925.247) dan (Rp8.053.571.746).

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp1.964.392.525

C.16 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.964.392.525 dan Rp1.292.007.145. Utang kepada Pihak Ketiga 2020 terdiri atas Pendapatan yang telah diterima namun belum diketahui pengirimnya sebesar Rp81.701.000, Utang BBM Pertamina Rp665.377.086, Remunerasi Desember 2020 sebesar Rp836.934.439, Honorarium pembimbing OJT sebesar Rp380.380.000.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Operasional
Rp197.859.838.498

D.1 Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp197.859.838.498 dan Rp277.542.330.336
Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Alokasi APBN	125.474.158.425	182.376.536.249	(31,20)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	47.174.726.000	61.200.225.621	(22,91)
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	4.383.965.309	9.793.531.414	(55,23)
Pendapatan Hibah BLU	-	393.000.000	(100,00)
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	16.592.400.500	18.530.070.948	(10,45)
Pendapatan BLU Lainnya	4.234.588.264	5.248.966.104	(19,32)
Jumlah	197.859.838.498	277.542.330.336	(28,71)

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat merupakan pendapatan yang diperoleh dari pembayaran taruna. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain merupakan pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian dan diluar Kementerian. Sedangkan Pendapatan BLU Lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh dari optimalisasi asset serta bunga bank.

Beban Pegawai
Rp37.218.406.936

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp37.218.406.936 dan Rp46.497.334.991. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	11.550.441.280	12.660.085.260	(8,76)
Beban Pembulatan Gaji PNS	160.255	187.061	(14,33)
Beban Tunj. Suami/istri PNS	928.525.890	1.046.364.940	(11,26)
Beban Tunj. Anak PNS	214.025.006	231.411.988	(7,51)
Beban Tunj. Struktural PNS	131.670.000	147.550.000	(10,76)
Beban Tunj. Fungsional PNS	837.445.000	780.850.000	7,25
Beban Tunj. PPh PNS	48.744.853	59.062.865	(17,47)
Beban Tunj. Beras PNS	532.504.260	586.357.140	(9,18)
Beban Uang Makan PNS	1.838.959.050	1.835.044.000	0,21
Beban Tunj. Umum PNS	300.349.950	371.055.000	(19,06)
Beban Tunj. Profesi Dosen	1.927.688.600	1.575.458.900	22,36
Beban Uang Lembur	431.011.000	232.320.000	85,52
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)		7.708.974.157	(100,00)
Beban Gaji dan Tunjangan	18.476.881.792	19.262.613.680	(100,00)
Jumlah	37.218.406.936	46.497.334.991	(19,96)

*Beban Persediaan
Rp12.701.992.601*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.701.992.601 dan Rp20.480.363.453. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	7.348.095.790	10.855.923.700	(32,31)
Beban Persediaan Bahan Baku	4.886.888.396	9.386.945.193	(47,94)
Beban Persediaan Lainnya	467.008.415	237.494.560	96,64
Jumlah Beban Persediaan	12.701.992.601	20.480.363.453	(37,98)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp101.135.295.521 dan Rp153.621.243.606. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	9,940,199,000	7,890,444,000	25.98
Beban Pengadaan Bahan Makanan	15,000,000	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	353,688,000	378,740,000	(6.61)
Beban Barang Operasional Lainnya	12,647,177,401	22,143,263,889	(42.88)
Beban Bahan	3,169,829,645	6,386,613,919	(50.37)
Beban Honor Output Kegiatan	10,364,302,000	18,073,885,000	(42.66)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	13,288,181,963	18,000,334,758	(26.18)
Beban Barang Non Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	1,273,492,000	-	-
Beban Langganan Listrik	4,671,594,438	3,188,043,912	46.53
Beban Langganan Telepon	108,672,125	89,059,927	22.02
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,678,100,000	1,813,395,000	(7.46)
Beban Jasa Konsultan	350,928,000	78,600,000	346.47
Beban Sewa	782,277,000	1,867,392,000	(58.11)
Beban Jasa Profesi	1,984,535,000	1,722,725,000	15.20
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	560,000,000	-	-
Beban Barang	19,218,448,488	44,474,518,202	(56.79)
Beban Jasa	2,894,599,496	14,968,765,109	(80.66)
Beban Ketersediaan Layanan BLU	165,044,900	-	-
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	14,389,176,065	12,537,462,890	14.77
Beban Penyediaan Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	3,280,050,000	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	8,000,000	(100.00)
Jumlah	101,135,295,521	153,621,243,606	(34.17)

Beban
Pemeliharaan
Rp20.658.380.845

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.658.380.845 dan Rp45.522.290.166. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,656,668,250	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	790,460,000		-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	8,260,217,003	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,507,062,000	17,082,982,005	(61.91)
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	2,289,932,300	(100.00)
Beban Pemeliharaan	810,468,700	4,863,354,400	(83.34)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	460,432,100	222,759,700	106.69
Beban Persediaan Suku Cadang	5,433,289,795	12,803,044,758	(57.56)
Jumlah	20,658,380,845	45,522,290,166	(54.62)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp8.360.887.241

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.360.887.241 dan Rp10.385.184.920. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	5,016,897,926	3,902,184,192	28.57
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,626,599,675	4,141,295,670	(36.58)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	80,550,000	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Negeri	0	419,768,000	
Beban Perjalanan	717,389,640	1,841,387,058	(61.04)
Jumlah	8,360,887,241	10,385,184,920	-19.49

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp135.067.785.335

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp135.067.785.335 dan Rp173.670.640.814. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	124,816,270,488	161,044,407,587	(22.50)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,050,830,702	11,549,203,138	(21.63)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	1,085,909,119	1,034,660,297	4.95
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	134,953,010,309	173,628,271,022	(22.27)
Beban Amortisasi Hak Cipta	446,400	446,400	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	114,328,626	41,923,392	172.71
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	114,775,026	42,369,792	170.89
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	135,067,785,335	173,670,640,814	(22.22)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp654.568.572

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp654.568.572 dan (Rp851.171.630). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(43,329,203)	(350,768,681)	100.00
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	697,897,775	(500,402,949)	100.00
Jumlah	654,568,572	(851,171,630)	100.00

Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
(Rp988.618.362)

D.9 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 adalah (Rp988.618.362) sedangkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2019 adalah Rp1.201.347.763. Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(3.336.885.356)	(1.000.873.973)	233,40
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	66.166.666	22.666.666	191,91
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	3.403.052.022	1.023.540.639	232,47
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.348.266.994	2.202.221.756	6,63
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.440.143.977	4.574.997.898	(2,95)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.091.876.983	2.372.776.142	(11,84)
Defisit Selisih Kurs	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(988.618.362)	1.201.347.783	178,60

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp1.388.882.632.173*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.388.882.632.173 dan Rp1.500.715.320.360.

*Defisit LO
(Rp118.926.096.915)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp118.926.096.915) dan (Rp170.582.208.201). Surplus/Defisit LO merupakan selisih tambah antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Penyesuaian aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi yang berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Nilai Persediaan. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
(Rp24.333.000)*

E.5 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi yang berasal dari Reklasifikasi aset. Koreksi atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp24.333.000) dan (Rp2.902.013.847).

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp2.406.543.000*

E.6 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap berasal dari penyesuaian ekuitas dari Revaluasi Aset Tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.406.543.000 dan Rp37.316.738.648.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
(Rp1.352.914.817)*

E.7 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp1.352.914.817) dan Rp27.731.480.023

Koreksi Lain-Lain Rp0 **E.8 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi atas penerimaan kembali pembayaran PNBP dari Negara atas setoran PNBP. Dikarenakan pada tanggal 23 Desember 2016 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug telah dinyatakan sebagai satker Badan Layanan Umum, Koreksi Lain-lain untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Ekuitas Akhir sebesar
Rp1.269.300.271.170* **E.9 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.269.300.271.170 dan Rp1.388.882.632.173

*Arus Keluar dari
Aktivitas Operasi
Rp228.343.315*

F.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Nilai Arus Kas Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp228.343.315 merupakan selisih dari Nilai Arus Kas Masuk pada aktivitas Operasi sebesar Rp187.637.603.356 dan Nilai Arus Kas Keluar pada aktivitas Operasi sebesar Rp187.409.260.041.

Arus Kas Masuk terdiri dari:

- Jumlah Pendapatan dari Badan Layanan Umum yang terdiri dari Pendapatan APBN sebesar Rp125.474.158.425, dan Jasa Layanan kepada Masyarakat sebesar Rp38.731.709.650, Jasa Layanan kepada Entitas Lain sebesar Rp4.383.965.309, Pendapatan dari Hasil Kerja Sama sebesar Rp14.022.099.500, Pendapatan Usaha Lainnya sebesar Rp4.234.588.264, dan Pendapatan PNBPN Umum sebesar Rp791.082.208.

Arus Keluar terdiri dari :

- Belanja Pegawai, yaitu beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

- Belanja Pegawai adalah sebesar Rp36.408.920.530

Rincian Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019
Belanja Gaji Pokok PNS	11,581,585,380	12,713,549,360
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	(12,888,300)	(7,819,200)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	166,592	214,835
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(5,706)	(19,312)
Belanja Tunj. Suami/istri PNS	931,213,330	1,050,936,720
Pengembalian Belanja Tunj. Suami/istri PNS	(832,450)	(781,920)
Belanja Tunj. Anak PNS	214,536,428	233,101,308
Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	(184,910)	(290,004)
Belanja Tunj. Struktural PNS	132,040,000	149,710,000
Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	(370,000)	
Belanja Tunj. Fungsional PNS	842,095,000	787,445,000
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS		(750,000)
Belanja Tunj. PPh PNS	49,404,203	59,254,583
Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	(108,350)	-
Belanja Tunj. Beras PNS	532,938,780	587,008,920
Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	(434,520)	(579,360)
Belanja Uang Makan PNS	1,840,289,050	1,833,714,000
Belanja Tunj. Umum PNS	306,640,000	371,650,000
Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS	(6,105,050)	
Belanja Tunj. Profesi Dosen	1,929,546,020	1,575,458,900
Pengembalian Belanja Tunj. Profesi Dosen	(1,857,420)	
Belanja Uang Lembur	431,011,000	232,320,000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	-	7,885,198,494
Belanja Gaji dan Tunjangan	17,640,241,453	19,262,613,680
Jumlah	36,408,920,530	46,731,936,004

- Belanja Barang adalah sebesar Rp73.616.439.997

Rincian Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	2020	2019
Belanja Keperluan Perkantoran	9,940,199,000	7,890,444,000
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	15,000,000	-
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	353,688,000	380,500,000
Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	(1,760,000)
Belanja Barang Operasional Lainnya	12,647,177,401	22,143,263,889
Belanja Bahan	3,169,829,645	6,386,613,919
Belanja Honor Output Kegiatan	10,364,302,000	18,327,635,000
Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	-	(253,750,000)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,354,253,463	18,000,334,758
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,273,492,000	-
Belanja Barang	19,218,448,488	44,474,518,202
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	3,280,050,000	-
Jumlah	73,616,439,997	117,347,799,768

- Belanja Jasa adalah sebesar Rp12.917.108.571

Rincian Belanja Jasa 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	2020	2019
Belanja Langganan Listrik	4,938,376,950	4,485,951,055
Belanja Langganan Telepon	108,672,125	89,059,927
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,678,100,000	1,813,395,000
Belanja Jasa Konsultan	350,928,000	78,600,000
Belanja Sewa	782,277,000	1,867,392,000
Belanja Jasa Profesi	1,984,535,000	1,722,725,000
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	560,000,000	-
Belanja Jasa	2,514,219,496	14,968,765,109
Jumlah	12,917,108,571	25,025,888,091

- Belanja Barang Menghasilkan Persediaan adalah sebesar Rp9.392.070.000

Rincian Belanja Barang Menghasilkan Persediaan 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	2020	2019
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,668,507,000	10,429,573,600
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	366,250,000	-
Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	(500,000)
Belanja Barang Persediaan Lainnya	-	5,693,536,327
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1,357,313,000	1,234,064,480
Jumlah	9,392,070,000	17,356,674,407

- Belanja Pemeliharaan adalah sebesar Rp31.302.363.863

Rincian Belanja Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	2020	2019
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,656,668,250	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	790,460,000	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,507,062,000	17,082,982,005
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,552,203,913	19,677,270,280
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	8,260,217,003
Belanja Pemeliharaan Lainnya	-	2,289,932,300
Belanja Pemeliharaan	1,795,969,700	4,863,354,400
Jumlah	31,302,363,863	52,173,755,988

- Belanja Perjalanan Dinas adalah sebesar Rp8.360.887.241

Rincian Belanja Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	2020	2019
Belanja Perjalanan Biasa	5,016,897,926	3,902,184,192
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,626,599,675	4,141,295,670
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		80,550,000
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri		419,768,000
Belanja Perjalanan	717,389,640	1,841,387,058
Jumlah	8,360,887,241	10,385,184,920

- Belanja Barang dan Jasa Kekhususan BLU Rp14.554.220.965

Rincian Belanja Barang dan Jasa Kekhususan BLU 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	2020	2019
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	14,554,220,965	12,537,462,890
Jumlah	14,554,220,965	12,537,462,890

- Penyetoran PNBPN ke Kas Negara sebesar Rp857.248.874

Rincian Penyetoran PNBPN ke Kas Negara 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BELANJA	2020	2019
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	857,248,874	246,550,681
Jumlah	857,248,874	246,550,681

*Arus Kas dari
Aktivitas Investasi
Rp66.166.666*

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp66.166.666. Arus kas masuk sebesar Rp66.166.666 dan Arus kas keluar sebesar (Rp0) merupakan perolehan Aset Tetap yang terdiri dari :

Rincian Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	2020	2019
Arus Kas Masuk	66,166,666	0
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	66,166,666	0
Arus Kas Keluar	0	2,353,882,580
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	-	1,818,216,000
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	-	535,666,580
Jumlah Belanja	66,166,666	(2,353,882,580)

*Arus Kas dari
Aktivitas Pendanaan
Rp0*

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 0 dikarenakan penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga berjumlah sama yaitu Rp0.

*Arus Kas dari
Aktivitas Transitoris
(Rp916.075.600)*

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar (Rp916.075.600) dari selisih penerimaan perhitungan pihak ketiga dengan pengeluaran perhitungan pihak ketiga masing masing sebesar Rp1.201.479.070 dan Rp2.117.554.670.

G.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih
(SAL Awal)
Rp5.987.777.083

G.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal)

Nilai Saldo Anggaran Lebih pada BLU awal periode adalah sebesar Rp5.987.777.083 yaitu Saldo dari Kas Badan Layanan Umum yang telah disahkan tahun lalu.

SiLPA (Sisa
Lebih/Kurang
Pembiayaan
Anggaran
(Rp124.322.399.570)

G.2 SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran)

SiLPA/SiKPA sebesar (Rp124.322.399.570) di dapat dari penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

URAIAN	2020 REALISASI
PENDAPATAN	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	62,229,611,597
Jumlah Pendapatan	62,229,611,597
BEBAN	
Belanja Pegawai	18,768,679,077
Belanja Barang	167,783,332,090
Belanja Modal	-
Belanja Bantuan Sosial	-
Jumlah Beban	186,552,011,167
SiLPA	(124,322,399,570)

Penyesuaian Transaksi
BLU dengan BUN
Rp124.616.909.551

G.3 Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Nilai Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar Rp124.616.909.551, yaitu selisih dari Alokasi Pendapatan APBN sejumlah Rp125.474.158.425 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dengan Penyetoran PNPB ke kas negara sejumlah (Rp857.248.874).

SiLPA/SiKPA Setelah
Penyesuaian
Rp294.509.981

G.4 SiLPA/SiKPA Setelah Penyesuaian

Nilai SiLPA/SiKPA Setelah Penyesuaian adalah sebesar Rp294.509.981 yaitu selisih dari SiLPA/SiKPA dengan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN.

SAL BLU Akhir
Rp6.282.287.064

G.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai SAL BLU Akhir sebesar Rp6.282.287.064 Terdiri dari Saldo awal SAL sebesar Rp5.987.777.083 dan SiLPA/SiKPA setelah Penyesuaian sebesar Rp294.509.981.

H. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

H.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 12 Maret 2021 terdapat pergantian KPA dan pengangkatan Direktur di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sesuai dengan SK. 296 Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Atas Nama Saudara Asri Santosa, S.T., S.SiT., M.T., NIP. 19710706 199301 1 001.

H.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi B/584/M.KT.01/2019 tanggal 9 Juli 2019, perihal Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug telah berubah status kelembagaan sebagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan vokasi di bidang penerbangan berada di bawah Kementerian Perhubungan menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.1074 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Pada Satker Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug BPSDM Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.240 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penggantian Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, susunan Dewan Pengawas Satker PK-BLU Politeknik Penerbangan Indonesia Curug adalah sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Anto Julianto, S.E., M.Si., Ak., CA.

Anggota : - Ir. Yudhi Sari Sitompul, MM.

- *Ex Officio* Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten.

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: Kp 911 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Sementara pada Satuan Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2020, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Nomor: SK.177 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Nomor: SK.61 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Nomor: SK.1146 Tahun 2020 tanggal 8

September 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2020 pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, susunan Pejabat Pengelola Anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Boedi Prihandono, M.Si.
2. Pejabat Penandatanganan SPM : Kurnia Djuprianto, S.E., M.Ak.
3. Bendahara Pengeluaran : Mirani Puspita Verbasari, A.Md.
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Dian Aggraini P., SE., M.T.
5. Bendahara Penerimaan : Abas S.E., M.A

4. Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Nomor: SK.32 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2020, susunan Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Penerbangan Indonesia Curug adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni dan BLU kecuali Short Course : Eko Budi Utomo, A.Md.
2. Pejabat Pembuat Komitmen Diklat BLU Short Course dan DPM : Ichyu Machmiyana, S.ST., MS.SMA.

5. Temuan BPK tahun 2017 yang belum selesai adalah Honor Instruktur Penerbang dan Mekanik Pesawat pada STPI Curug Tidak Sesuai Ketentuan. Temuan BPK tahun 2018 yang belum selesai adalah Penetapan Tarif Jasa Layanan Pendidikan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Tahun Akademik 2018/2019 Tidak Sesuai Ketentuan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG



ASRI SANTOSA, S.T., S.Si.T., M.T.
NIP. 19710706 199301 1 001

BAB III

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

I. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Setiap Satker mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi (Sundjaja, 2002:68).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, yang merupakan ikhtisar dari transaksi keuangan untuk 1 tahun periode. Laporan keuangan terdiri dari Neraca, laporan Laba/Rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan laporan penjelasan.

Laporan yang disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK). Laporan keuangan merupakan informasi prestasi manajemen. Prestasi yang dimaksudkan adalah capaian kerja manajemen suatu perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal.

Sundjaja dan Inge Barlian (2002:68) mendefinisikan "laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data- data/aktivitas tersebut".

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1) menjelaskan, "Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan".

Terdapat dua metode analisis yang digunakan, yaitu analisis horizontal dan vertikal.

1. Analisis Horisontal/Analisis Dinamis

Analisis ini sering juga disebut dengan analisis trend. Teknik analisa horizontal berguna untuk mengetahui trend pertumbuhan dari masing-masing perkiraan dari waktu ke waktu, sehingga akan dapat diprediksi arah pertumbuhan dari entitas tersebut. Tujuan dari analisis horizontal adalah untuk mengetahui perubahan dan perkembangan masing-masing pos. Perhatian pada kewajaran perubahan dan perkembangan masing-masing.

Analisis rasio keuangan horizontal juga dapat dikatakan analisa yang membandingkan suatu pos dalam laporan keuangan dengan pos yang sama tetapi pada

periode yang berbeda.

a. Analisis Perbandingan

Adapun formula yang digunakan untuk analisis horizontal yaitu :

Perubahan rupiah = Angka periode tahun berjalan – angka periode tahun dasar

Perubahan persentase = perubahan rupiah dibagi angka periode dasar x 100%.

Tabel 35 :

Ilustrasi Analisis Perbandingan Neraca

URAIAN	31 Desember		Kenaikan/Penurunan		% dari Total Aset	
	2020	2019	Rp	%	2020	2019
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	81.701.000	997.776.600	(916.075.600)	(92)	0,01	0,07
Kas pada Badan Layanan Umum	6.282.287.064	5.987.777.083	294.509.981	5	0,49	0,43
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	13.963.431.100	2.950.113.750	11.013.317.350	373	1,10	0,21
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	(1.843.575.628)	(1.189.007.056)	(654.568.572)	55	-0,15	-0,09
<i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	12.119.855.472	1.761.106.694	10.358.748.778	588	0,95	0,13
Persediaan	80.895.610.345	74.870.292.204	6.025.318.141	8	6,36	5,39
Jumlah Aset Lancar	99.379.453.881	83.616.952.581	15.762.501.300	19	7,82	6,01
ASET TETAP						
Peralatan dan Mesin	2.518.564.270.529	2.521.795.945.679	(3.231.675.150)	-	198,09	181,40
Gedung dan Bangunan	380.404.636.398	377.210.781.398	3.193.855.000	-	29,92	27,13
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.492.912.534	21.393.087.534	2.099.825.000	-	1,85	1,54
Aset Tetap Lainnya	31.390.846.829	31.512.511.829	(121.665.000)	-	2,47	2,27
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.827.001.813.421)	(1.688.818.166.149)	(138.183.647.272)	8	-143,70	-121,48
Jumlah Aset Tetap	1.126.850.852.869	1.263.094.160.291	(136.243.307.422)	(11)	88,63	90,86
ASET LAINNYA						
Aset Tak Berwujud	34.346.757.192	34.246.757.192	100.000.000	-	2,70	2,46
Aset Lain-lain	19.855.525.000	17.270.341.000	2.585.184.000	15	1,56	1,24
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(9.022.662.734)	(8.053.571.746)	(969.090.988)	12	-0,71	-0,58
Jumlah Aset Lainnya	45.179.619.458	43.463.526.446	1.716.093.012	4	3,55	3,13
JUMLAH ASET	1.271.409.926.208	1.390.174.639.318	29.958.200	-	100,00	100,00

Sumber : data diolah (Neraca Tingkat Satuan Kerja PPI Curug)

Dari tabel di atas untuk kolom 1 dan 2 data di peroleh dari Neraca PPI Curug tahun 2019 dan 2020, kolom 3 menunjukkan perubahan yang terjadi dalam absolutnya (jumlah dalam rupiah), sedangkan kolom 4 menunjukkan penambahan atau pengurangan yang dinyatakan dalam persentase. Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah kenaikan/penurunan dari setiap pos dengan jumlah yang terdapat dalam sebelumnya atau tahun yang dijadikan pembanding (tahun dasar). Kolom 5 ratio dihitung dengan membagi jumlah rupiah tiap pos dari tahun yang diperbandingkan dengan tahun dasar. Kolom 6 dan 7 atau persentase dari total dihitung dari masing-masing pos asset dengan total asset.

Tabel 36 :

URAIAN	REALISASI	REALISASI	Kenaikan/Penurunan		% dari Total Belanja	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Rp	%	2020	2019
PENDAPATAN						
Pendapatan PNBP Lainnya	857,248,874	246,550,681	610,698,193	347.70	0.46	0.09
Pendapatan Badan Layanan Umum	61,372,362,723	105,025,870,162	(43,653,507,439)	58.44	32.90	36.99
Pendapatan jasa layanan dari umum	38,731,709,650	61,598,418,746	(22,866,709,096)	62.88	20.76	21.70
Pendapatan hibah terkait uang	-	-	-	-	0.00	0.00
Pendapatan hibah tidak terkait uang	-	-	-	-	-	-
Pendapatan hasil kerjasama BLU	14,022,099,500	28,384,953,898	(14,362,854,398)	49.40	7.52	10.00
Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	4,383,965,309	9,793,531,414	(5,409,566,105)	44.76	2.35	42
Pendapatan BLU lainnya	4,234,588,264	5,248,966,104	(1,014,377,840)	80.67	2.27	1.85
Jumlah Pendapatan	62,229,611,597	105,272,420,843	(43,042,809,246)	59.11	33.36	37.08
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	18,768,679,077	27,469,322,324	(8,700,643,247)	68.33	10.06	9.68
Belanja Barang	167,783,332,090	254,089,379,744	(86,306,047,654)	66.03	89.94	89.50
Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	186,552,011,167	281,558,702,068	(95,006,690,901)	66.26	100.00	99.17
BELANJA MODAL						
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	0.00	0.00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	0.00	0.00
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	2,353,882,580	(2,353,882,580)	-	0.00	0.83
Jumlah Belanja Modal	-	2,353,882,580	(2,353,882,580)	-	0.00	0.83

Ilustrasi Analisis Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Sumber : Data Diolah (LRA PPI Curug)

Tabel di atas menunjukkan kolom 1 dan 2 dari laporan Neraca perbandingan PPI Curug tahun 2016 dan 2020, kolom 3 menunjukkan perubahan yang terjadi dalam absolutnya (jumlah rupiah), sedangkan kolom 4 menunjukkan penambahan persentase atau pengurangan yang dinyatakan dengan persentase. Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah kenaikan/penurunan dari setiap pos dengan jumlah yang terdapat dalam tahun sebelumnya atau tahun yang dijadikan pembandingan. Kolom 5 dihitung dengan membagi jumlah rupiah tiap pos dari tahun yang diperbandingkan dengan tahun dasar. Kolom 6 dan 7 dihitung dari membagi masing-masing pos pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan totalnya.

b. Trend atau tendensi

Salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan adalah dengan menggunakan metode trend analisis.

Dimana menurut S. Munawir (2007:17) menjelaskan "Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun".

Dengan menggunakan teknik analisis tersebut akan diketahui perubahan mana yang cukup penting untuk dianalisa lebih lanjut. Teknik analisa tersebut hanya akan praktis bila digunakan untuk menganalisa dua atau tiga (periode) laporan keuangan, karena bila laporan keuangan yang diperbandingkan lebih dari tiga tahun akan ditemui kesulitan.

Cara yang terbaik untuk menganalisa laporan keuangan yang lebih dari tiga tahun tersebut adalah dengan menggunakan angka index, dan semua data laporan keuangan yang dianalisa dihubungkan dengan angka index tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Dengan menganalisa laporan keuangan untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun akan diketahui kecenderungan atau arah atau trend dari posisi keuangan ataupun hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, apakah menunjukkan arah yang tetap, meningkat atau bahkan menurun.

Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui tentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memprediksi situasi masa itu ke masa yang akan datang. Selanjutnya menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2005:73) mendefinisikan, "Suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi, dengan melihat kecenderungan (trend) angka-angka ratio tertentu, dapat diperoleh gambaran apakah ratio-ratio tersebut cenderung naik, turun atau relatif konstan. Dari gambaran ini akan dapat dideteksi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan dapat diobservasi baik buruknya pengelolaan perusahaan".

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis trend atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan yaitu naik, turun, ataupun menetap, serta seberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase.

Berikut ini data yang diperoleh dari laporan operasional tahun 2019 dan 2020

Tabel 37 :

Laporan Operasional 2017 – 2020

POS POS LO	2020	2019	2018	2017
Pendapatan Operasional	197.859.838.498	277.542.330.336	322.468.322.959	749.439.678.302
Belanja Operasional	315.797.317.051	449.325.886.320	481.992.410.309	465.860.960.013
Surplus (Defisit)	(117.937.478.553)	(171.783.555.984)	(159.524.087.350)	283.578.718.289

Sumber : data diolah (LO & LRA)

Tahun 2017 dipilih sebagai tahun dasar karena berbagai pertimbangan maka angka pada tahun tersebut diberikan nilai 100. Angka pada tahun berikutnya dibandingkan dengan tahun dasar sehingga diperoleh trend selama empat tahun untuk setiap pos.

Trend dari angka tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 38 :

Trend Laporan Operasional Tahun 2017 – 2020

POS POS LO	2020	2019	2018	2017
Pendapatan Operasional	26%	37%	43%	100%
Beban Operasional	68%	96%	103%	100%

Sumber : data diolah (LO Pendapatan)

Dari analisis tersebut diketahui bahwa trend kenaikan pendapatan dan belanja menurun.

2. Analisis Vertikal/ Analisis Statis

Analisis vertikal (statis) analisis laporan keuangan yang terbatas hanya pada Satu periode akuntansi saja, misalnya berupa analisis rasio, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan yang lainnya sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat tersebut. Analisis ini juga disebut analisis statis karena kesimpulan yang diperoleh hanya untuk periode tersebut tanpa mengetahui perkembangannya. Anggaran belanja PPI Curug pada tahun 2020 sebesar Rp206.231.638.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp186.552.011.167, yang berarti persentase daya serapnya sebesar 90,46%, sehingga dapat disimpulkan kemampuan satker mengelola keuangan pada tahun 2020 sangat baik.

II. ANALISIS RASIO KEUANGAN

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan satker untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Analisis rasio keuangan adalah analisis yang menghubungkan perkiraan laporan keuangan satu dengan lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur serta dapat ditempuh untuk memperoleh tambahan dana. (Zaki Baridwan, 1997 :17)

Suatu rasio tidak memiliki arti dalam dirinya sendiri, melainkan harus diperbandingkan dengan rasio yang lain agar rasio tersebut menjadi lebih sempurna dan untuk melakukan analisis ini dapat dengan cara membandingkan prestasi suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga diketahui adanya kecenderungan selama periode tertentu, selain itu dapat juga dilakukan dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri tersebut sehingga dapat diketahui bagaimana keuangan dalam industri.

Dalam mengadakan interpretasi dan analisis laporan keuangan suatu perusahaan, seorang penganalisis memerlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio. Pengertian rasio sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam “arithmatical terms” yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan.

Secara garis besar ada empat jenis rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage finansial dan rasio keuntungan.

1. Ratio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas satker dan asset lancar lainnya dengan utang lancar. Rasio digunakan untuk mengukur kemampuan satker dalam memenuhi kewajiban – kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi (kewajiban jangka pendek).

a. *Current Rasio* (Rasio Lancar)

Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi. Rasio lancar menggambarkan kemampuan pemerintah pusat (satker) untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nilai standar rasio lancar dianggap aman adalah 2 : 1 dan nilai minimalnya adalah 1 : 1, jika nilai rasio lancar kurang dari 1 : 1 maka keuangan tidak lancar.

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Tabel 39 :

Analisis Rasio Lancar tahun 2020 dan 2019

TAHUN	ASET LANCAR	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	RASIO LANCAR
2020	99.379.453.881	1.964.392.525	5059%
2019	83.616.952.581	1.292.007.145	6472%

Sumber : data diolah (Neraca PPI Curug)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan keuangan PPI Curug cukup lancar karena berada di atas 100%

b. *Quick Rasio* (Rasio Cepat)

Rasio Cepat merupakan perbandingan antara asset lancar setelah dikurangi persediaan terhadap kewajiban jangka pendek suatu satker. Alat ini lebih akurat untuk mengukur likuiditas dimana persediaan tidak diikutsertakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek karena sifatnya yang kurang likuid. Untuk prinsip kehati – hatian, maka besarnya rasio cepat minimal 100%, artinya kewajiban jangka pendek Rp1 dijamin oleh asset lancar selain persediaan Rp1.

$$\text{QUICK RATIO} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Tabel 40 :

Analisis Rasio Cepat tahun 2019 dan 2020

TAHUN	ASET LANCAR	PERSEDIAAN	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	RASIO LANCAR
2020	99.379.453.881	80.895.610.345	1.964.392.525	941%
2019	83.616.952.581	74.870.292.204	1.292.007.145	677%

Sumber : data diolah (Neraca PPI Curug)

Dari perhitungan rasio di atas dapat disimpulkan kemampuan PPI Curug dalam mengelola kewajiban jangka pendeknya dianggap baik karena berada pada posisi aman lebih dari 100%

2. Ratio Utang (*Leverage Ratio*)

Yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak satker menggunakan dana dari aktivitas pembiayaan (pembiayaan).

a. Rasio Total Utang terhadap Modal Sendiri (*Debt To Equity Ratio*)

DTER merupakan perbandingan antaraj total hutang dengan ekuitas sendiri (Modal), data ini dapat diperoleh dari neraca tahunan satker yang akan dianalisis.

$$\text{Debt To Equity Ratio (DTER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 41 :

Analisis DTER tahun 2019 dan 2020

TAHUN	UTANG	EKUITAS	DTER
2020	1.964.392.525	1.269.300.271.170	0,15%
2019	1.292.007.145	1.388.882.632.173	0,09%

Sumber : data diolah (Neraca PPI Curug)

Dari data DTER diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PPI Curug sangatlah baik, dikarenakan jumlah ekuitas jauh lebih besar dibanding dengan total hutangnya.

b. Ratio Utang (Debt Rasio)

Merupakan perbandingan antara total hutang terhadap total aset. Cara perhitungan ratio utang yaitu :

$$\text{Ratio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 42 :

Analisis Rasio Utang tahun 2019 dan 2020

TAHUN	UTANG	ASET	DTER
2020	1.964.392.525	1.271.264.663.695	0,15%
2019	1.292.007.145	1.390.174.639.318	0,09%

Sumber : data diolah (Neraca PPI Curug)

Dari perhitungan rasio di atas dapat disimpulkan pengelolaan keuangan PPI Curug sangat baik, karena rasio utangnya < 50 %

3. Rasio POBO

Yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan satker untuk membiayai kebutuhan operasionalnya melalui pendapatan layanannya secara mandiri. Realisasi PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN.

Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi belanja pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa serta biaya lainnya Satker BLU, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN maupun pendapatan operasional Satker BLU.

$$\text{POBO} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Belanja Operasoional}} \times 100\%$$

Tabel 43 :

Rasio POBO

TAHUN	PENDAPATAN OPERASIONAL	BELANJA OPERASIONAL	POBO
2020	61.372.362.723	186.552.011.167	32,90%
2019	105.025.870.162	281.558.702.068	37,30%

Sumber : Data Diolah (LRA PPI Curug)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan satker PPI Curug dalam menghasilkan pendapatan kurang baik, karena belum mampu menutupi biaya operasional dengan rata-rata lebih dari 60%,

Namun selain dari rasio keuangan di atas terdapat pula beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan pemerintah, antara lain, sebagai berikut :

4. Rasio Kemandirian

Tabel 44 :

Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
REndah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75%-100%

Rasio Kemandirian Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dapat dihitung Sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Pagu DIPA}} \times 100 \%$$

Tabel 45 :

Rasio Kemandirian

TAHUN	PENDAPATAN	PAGU DIPA	Rasio Kemandirian
2020	61,372,362,723	206,231,638,000	29.76%
2019	105,025,870,162	289,398,532,000	36.29%

Sumber : Data Diolah (LRA PPI Curug)

Hasil Perhitungan rasio Kemandirian Keuangan tahun 2019-2020 PPI Curug dapat dilihat pada perhitungan rasio berikut ini :

Dari perhitungan rasio di atas dapat disimpulkan bahwa proyeksi tingkat kemandirian PPI Curug tahun 2020 dan 2019 berada pada posisi 29,76% dan 36,29% yang berarti tingkat kemandirian PPI Curug dalam mengelola keuangan kurang baik karena berada pada posisi cukup rendah.

5. Rasio Efektifitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan satker (PPI Curug) dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Satker dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 100 persen, tetapi semakin tinggi rasio efektifitas berarti kemampuan satker semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio ini perlu didampingi dengan rasio efisiensi. Pemerintah telah menyusun pedoman penilaian tingkat efektifitas keuangan, melalui Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 berikut ini:

Tabel 46:

Kriteria Efektivitas Keuangan

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	> 90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≥60

Sumber : Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Perhitungan Rasio Efektivitas PPI Curug Tahun 2019 dan 2020, yaitu :

Tabel 45 :

Rasio Efektifitas

TAHUN	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Rasio Efektifitas
2020	80,061,926,000	61,372,362,723	76.66%
2019	94,940,515,000	105,025,870,162	110.62%

Sumber : Data Diolah (LRA PPI Curug)

Dari perhitungan rasio efektivitas PPI Curug di atas dapat disimpulkan tingkat efektivitas PPI Curug untuk pengelolaan keuangan pada tahun 2019 cukup efektif, namun pada tahun 2020 kurang efektif.

6. Rasio Serapan Anggaran

Rasio Serapan Anggaran belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja dengan anggaran belanja. Formula yang digunakan untuk menghitung rasio serapan anggaran belanja itu :

$$\text{Rasio Serapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja Negara}}{\text{Anggaran Belanja Negara}} \times 100\%$$

Tabel 46:

Rasio Serapan Anggaran PPI Curug

TAHUN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	RASIO SERAPAN ANGGARAN
2020	206,231,638,000	186,552,011,167	90.46%
2019	289,398,532,000	283,912,584,648	98.10%

Sumber : Data Diolah (LRA PPI Curug)

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Pokok disusun sebagai salah satu persyaratan Administratif untuk mengelola keuangan dengan PPK-BLU, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan Dokumen kepada Menteri Keuangan.

Dengan ditetapkannya PPI Curug menjadi Satuan Kerja yang menerapkan PPK-BLU maka sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan di bawah Kementerian Perhubungan mampu mewujudkan SDM yang handal dan berdaya saing tinggi.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
WILAYAH/PROPINSI : 2900 BANTEN
SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : Wednesday, April
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pastkt

No	URAIAN	2020					2019				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH										
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	62,229,611,597	62,229,611,597	0.00	94,940,515,000	105,272,420,843	10,331,905,843	110.88		
	Pendapatan PNPB Lainnya	0	857,248,874	857,248,874	0.00	0	246,550,681	246,550,681	0.00		
	Pendapatan Badan Layanan Umum	0	61,372,362,723	61,372,362,723	0.00	94,940,515,000	105,025,870,162	10,085,355,162	110.62		
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	38,731,709,650	38,731,709,650	0.00	56,140,668,000	61,598,418,746	5,457,750,746	109.72		
	Pendapatan Hibah terikat - uang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Pendapatan Hibah tidak terikat - uang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	0	14,022,099,500	14,022,099,500	0.00	38,393,347,000	28,384,953,898	(10,008,393,102)	73.93		
	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas	0	4,383,965,309	4,383,965,309	0.00	0	9,793,531,414	9,793,531,414	0.00		
	Pendapatan BLU Lainnya	0	4,234,588,264	4,234,588,264	0.00	406,500,000	5,248,966,104	4,842,466,104	1291.26		
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	62,229,611,597	62,229,611,597	0.00	94,940,515,000	105,272,420,843	10,331,905,843	110.88		
B	BELANJA NEGARA										
	Belanja Pegawai	19,343,460,000	18,768,679,077	(574,780,923)	97.03	28,444,853,000	27,469,322,324	(975,530,676)	96.57		
	Belanja Barang dan Jasa	186,888,178,000	167,783,332,090	(19,104,845,910)	89.78	257,677,488,000	254,089,379,744	(3,588,108,256)	98.61		
	Belanja Barang	59,211,243,000	59,152,698,509	(58,544,491)	99.90	90,283,264,000	88,995,891,493	(1,287,372,507)	98.57		
	Belanja Jasa	10,407,380,000	10,402,889,075	(4,490,925)	99.96	10,235,583,000	10,057,122,982	(178,460,018)	98.26		
	Belanja Pemeliharaan	29,507,000,000	29,506,394,163	(605,837)	100.00	47,384,835,000	47,310,401,588	(74,433,412)	99.84		
	Belanja Perjalanan Dinas	7,700,629,000	7,643,497,601	(57,131,399)	99.26	8,688,370,000	8,543,797,862	(144,572,138)	98.34		
	Belanja Badan Layanan Umum	80,061,926,000	61,077,852,742	(18,984,073,258)	76.29	101,085,436,000	99,182,165,819	(1,903,270,181)	98.12		
	Belanja Gaji dan Tunjangan	27,720,000,000	17,640,241,453	(10,079,758,547)	63.64	19,621,500,000	19,262,613,680	(358,886,320)	98.17		
	Belanja Barang	25,048,849,000	22,498,498,488	(2,550,350,512)	89.82	45,030,626,000	44,474,518,202	(556,107,798)	98.77		
	Belanja Jasa	2,954,380,000	2,514,219,496	(440,160,504)	85.10	15,641,880,000	14,968,765,109	(673,114,891)	95.70		
	Belanja Pemeliharaan	1,801,000,000	1,795,969,700	(5,030,300)	99.72	4,863,504,000	4,863,354,400	(149,600)	100.00		
	Belanja Perjalanan	927,960,000	717,389,640	(210,570,360)	77.31	1,944,432,000	1,841,387,058	(103,044,942)	94.70		
	Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Ketersediaan Layanan BLU	389,520,000	165,044,900	(224,475,100)	42.37	0	0	0	0.00		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	19,859,637,000	14,389,176,065	(5,470,460,935)	72.45	12,562,720,000	12,537,462,890	(25,257,110)	99.80		
	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU	1,360,580,000	1,357,313,000	(3,267,000)	99.76	1,420,774,000	1,234,064,480	(186,709,520)	86.86		
	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/PEMDA	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Modal	0	0	0	0.00	3,276,191,000	2,353,882,580	(922,308,420)	71.85		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 022
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127
JENIS KEWENANGAN : KP

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
KANTOR PUSAT

Kode Lab. : LRAST
Tanggal : Wednesday, April
Halaman : 2
ProgId : hlpasist

No	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Badan Layanan Umum	0	0	0	0.00	3,276,191,000	2,353,882,580	(922,308,420)	71.85
	Belanja Modal Tanah - BLU	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	0	0	0.00	2,654,791,000	1,818,216,000	(836,575,000)	68.49
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	0	0	0.00	621,400,000	535,666,580	(85,733,420)	86.20
	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	206,231,638,000	186,552,011,167	(19,679,626,833)	90.46	289,398,532,000	283,912,584,648	(5,485,947,352)	98.10
C	SILPA / SIKPA								
	SURPLUS / DEFISIT	0	(124,322,399,570)	0	0.00	0	(178,640,163,805)	0	0.00
	JUMLAH SILPA / (SIKPA)	0	(124,322,399,570)	0	0.00	0	(178,640,163,805)	0	0.00

TANGERANG, 30 APRIL 2021

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

ASRI SANTOSA, S.T. S.SiT., M.T.
NIP. 19710706 199301 1 001



NERACA
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIE1T
 Tanggal : 28/04/2021
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROPINSI : 2900 **BANTEN**
SATUAN KERJA : 288127 **POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

JENIS KEWENANGAN : KP **KANTOR PUSAT**

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	81,701,000	997,776,600	(916,075,600)	(91.81)
Kas pada Badan Layanan Umum	6,282,287,064	5,987,777,083	294,509,981	4.91
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	13,963,431,100	2,950,113,750	11,013,317,350	373.31
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1,843,575,628)	(1,189,007,056)	(654,568,572)	55.05
<i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	<i>12,119,855,472</i>	<i>1,761,106,694</i>	<i>10,358,748,778</i>	<i>588.19</i>
Persediaan	80,895,610,345	74,870,292,204	6,025,318,141	8.04
JUMLAH ASET LANCAR	99,379,453,881	83,616,952,581	15,762,501,300	18.85
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,518,564,270,529	2,521,795,945,679	(3,231,675,150)	(0.12)
Gedung dan Bangunan	380,404,636,398	377,210,781,398	3,193,855,000	0.84
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23,492,912,534	21,393,087,534	2,099,825,000	9.81
Aset Tetap Lainnya	31,390,846,829	31,512,511,829	(121,665,000)	(0.38)
Akumulasi Penyusutan	(1,827,001,813,421)	(1,688,818,166,149)	(138,183,647,272)	8.18
JUMLAH ASET TETAP	1,126,850,852,869	1,263,094,160,291	(136,243,307,422)	(10.78)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	34,246,757,192	34,246,757,192	0	0.00
Aset Lain-lain	19,855,525,000	17,270,341,000	2,585,184,000	14.96
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(9,067,925,247)	(8,053,571,746)	(1,014,353,501)	12.59
JUMLAH ASET LAINNYA	45,034,356,945	43,463,526,446	1,570,830,499	3.61
JUMLAH ASET	1,271,264,663,695	1,390,174,639,318	(118,909,975,623)	(8.55)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,964,392,525	1,292,007,145	672,385,380	52.04
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,964,392,525	1,292,007,145	672,385,380	52.04
JUMLAH KEWAJIBAN	1,964,392,525	1,292,007,145	672,385,380	52.04
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,269,300,271,170	1,388,882,632,173	(119,582,361,003)	(8.60)
JUMLAH EKUITAS	1,269,300,271,170	1,388,882,632,173	(119,582,361,003)	(8.60)

NERACA
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAI1T
 Tanggal : 28/04/2021
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 WILAYAH/PROPINSI : 2900 BANTEN
 SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,271,264,663,695	1,390,174,639,318	(118,909,975,623)	(8.55)

TANGERANG, 30 APRIL 2021

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG



ASRI SANTOSA, S.T., S.SiT., M.T.

NIP. 19710706 199301 1 001

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 WILAYAH/PROPINSI : 2900 BANTEN
 SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Alokasi APBN	125,474,158,425	182,376,536,249	(56,902,377,824)	(31.20)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	47,174,726,000	61,200,225,621	(14,025,499,621)	(22.91)
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	4,383,965,309	9,793,531,414	(5,409,566,105)	(55.23)
Pendapatan Hibah BLU	0	393,000,000	(393,000,000)	(100.00)
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	16,592,400,500	18,530,070,948	(1,937,670,448)	(10.45)
Pendapatan BLU Lainnya	4,234,588,264	5,248,966,104	(1,014,377,840)	(19.32)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	197,859,838,498	277,542,330,336	(79,682,491,838)	(28.71)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	37,218,406,936	46,497,334,991	(9,278,928,055)	(19.95)
Beban Persediaan	12,701,992,601	20,480,363,453	(7,778,370,852)	(37.97)
Beban Barang dan Jasa	101,135,295,521	153,621,243,606	(52,485,948,085)	(34.16)
Beban Pemeliharaan	20,658,380,845	45,522,290,166	(24,863,909,321)	(54.61)
Beban Perjalanan Dinas	8,360,887,241	10,385,184,920	(2,024,297,679)	(19.49)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	135,067,785,335	173,670,640,814	(38,602,855,479)	(22.22)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	654,568,572	(851,171,630)	1,505,740,202	(176.90)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	315,797,317,051	449,325,886,320	(133,528,569,269)	(29.72)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(117,937,478,553)	(171,783,555,984)	53,846,077,431	(31.35)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	66,166,666	22,666,666	43,500,000	191.91
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	3,403,052,022	1,023,540,639	2,379,511,383	232.47
JUMLAH Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	(3,336,885,356)	(1,000,873,973)	(2,336,011,383)	(233.40)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,440,143,977	4,574,997,898	(134,853,921)	(2.94)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,091,876,983	2,372,776,142	(280,899,159)	(11.83)
JUMLAH Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,348,266,994	2,202,221,756	146,045,238	6.63
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(988,618,362)	1,201,347,783	(2,189,966,145)	(182.30)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(118,926,096,915)	(170,582,208,201)	51,656,111,286	(30.28)

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
WILAYAH/PROPINSI : 2900 BANTEN
SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5

TANGERANG, 30 APRIL 2021

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA
CURUG



ASRI SANTOSA, S.T., S.SIT., M.T.

NIP. 19710706 199301 1 001

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 WILAYAH/PROPINSI : 2900 BANTEN
 SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
 JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	1,388,882,632,173	1,500,715,320,360	(111,832,688,187)	(7.45)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(118,926,096,915)	(170,582,208,201)	51,656,111,286	(30.28)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	1,029,295,183	62,146,204,824	(61,116,909,641)	(98.34)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	(24,333,000)	(2,902,013,847)	2,877,680,847	(99.16)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	2,406,543,000	37,316,738,648	(34,910,195,648)	(93.55)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1,352,914,817)	27,731,480,023	(29,084,394,840)	(104.87)
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,685,559,271)	(3,396,684,810)	1,711,125,539	(50.37)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(119,582,361,003)	(111,832,688,187)	(7,749,672,816)	6.92
EKUITAS AKHIR	1,269,300,271,170	1,388,882,632,173	(119,582,361,003)	(8.61)

TANGERANG, 30 APRIL 2021

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA
 CURUG



ASRI SANTOSA, S.T., S.Si.T., M.T.
 NIP. 19710706 199301 1 001

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROPINSI : 2900 **BANTEN**
SATUAN KERJA : 288127 **POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

JENIS KEWENANGAN : KP **KANTOR PUSAT**

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
ARUS MASUK KAS				
Pendapatan dari Alokasi APBN	125,474,158,425	182,376,536,249	(56,902,377,824)	(31.20)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	38,731,709,650	61,598,418,746	(22,866,709,096)	(37.12)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	4,383,965,309	9,793,531,414	(5,409,566,105)	(55.23)
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	14,022,099,500	28,384,953,898	(14,362,854,398)	(50.60)
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0.00
Pendapatan Usaha Lainnya	4,234,588,264	5,248,966,104	(1,014,377,840)	(19.32)
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0.00
Pendapatan PNBPN Umum	791,082,208	223,884,015	567,198,193	253.34
JUMLAH ARUS MASUK KAS	187,637,603,356	287,626,290,426	(99,988,687,070)	(34.76)
ARUS KELUAR KAS				
Pembayaran Pegawai	36,408,920,530	46,731,936,004	(10,323,015,474)	(22.08)
Pembayaran Barang	73,616,439,997	117,347,799,768	(43,731,359,771)	(37.26)
Pembayaran Jasa	12,917,108,571	25,025,888,091	(12,108,779,520)	(48.38)
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	9,392,070,000	17,356,674,407	(7,964,604,407)	(45.88)
Pembayaran Pemeliharaan	31,302,363,863	52,173,755,988	(20,871,392,125)	(40.00)
Pembayaran Perjalanan Dinas	8,360,887,241	10,385,184,920	(2,024,297,679)	(19.49)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	14,554,220,965	12,537,462,890	2,016,758,075	16.08
Pembayaran Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0.00
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	857,248,874	246,550,681	610,698,193	247.69
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	187,409,260,041	281,805,252,749	(94,395,992,708)	(33.49)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	228,343,315	5,821,037,677	(5,592,694,362)	(96.07)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
ARUS MASUK KAS				
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0.00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	22,666,666	(22,666,666)	(100.00)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0.00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0.00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	66,166,666	0	66,166,666	0.00
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	66,166,666	22,666,666	43,500,000	191.91
ARUS KELUAR KAS				
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0.00

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROPINSI : 2900 **BANTEN**
SATUAN KERJA : 288127 **POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

JENIS KEWENANGAN : KP **KANTOR PUSAT**

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	0	1,818,216,000	(1,818,216,000)	(100.00)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0.00
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0.00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	535,666,580	(535,666,580)	(100.00)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	0	2,353,882,580	(2,353,882,580)	(100.00)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	66,166,666	(2,331,215,914)	2,397,382,580	(102.83)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
ARUS MASUK KAS				
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0.00
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	0	0	0	0.00
ARUS KELUAR KAS				
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0.00
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	0	0	0	0.00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS				
ARUS MASUK KAS				
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	1,201,479,070	7,293,720,600	(6,092,241,530)	(83.52)
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	1,201,479,070	7,293,720,600	(6,092,241,530)	(83.52)
ARUS KELUAR KAS				
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	2,117,554,670	7,264,600,500	(5,147,045,830)	(70.85)
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	2,117,554,670	7,264,600,500	(5,147,045,830)	(70.85)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(916,075,600)	29,120,100	(945,195,700)	(3,245.85)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 WILAYAH/PROPINSI : 2900 BANTEN
 SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	(621,565,619)	3,518,941,863	(4,140,507,482)	(3.43)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0.00
Saldo Awal Kas	6,985,553,683	3,466,611,820	3,518,941,863	201.50
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0.00
SALDO AKHIR KAS	6,363,988,064	6,985,553,683	(621,565,619)	(8.89)
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :				
Saldo Akhir Kas pada BLU	6,282,287,064	5,987,777,083	294,509,981	4.91
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	81,701,000	997,776,600	(916,075,600)	(91.81)
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0.00
Jumlah Rincian Saldo	6,363,988,064	6,985,553,683	(621,565,619)	(8.89)
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :				
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0.00

TANGERANG, 30 APRIL 2021

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA
 CURUG


 ASRI SANTOSA, S.T., S.SIT., M.T.
 NIP. 19710706 199301 1 001

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 WILAYAH/PROPINSI : 2900 BANTEN
 SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
 JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	5,987,777,083	2,497,955,320	3,489,821,763	139.70
PENGUNAAN SAL	0	0	0	0.00
Sub Total	5,987,777,083	2,497,955,320	3,489,821,763	139.70
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(124,322,399,570)	(178,640,163,805)	54,317,764,235	(30.40)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	0.00
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	124,616,909,551	182,129,985,568	(57,513,076,017)	(31.57)
Pendapatan Alokasi APBN	125,474,158,425	182,376,536,249	(56,902,377,824)	(31.20)
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(857,248,874)	(246,550,681)	(610,698,193)	247.69
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	0.00
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0.00
Transaksi antar BLU	0	0	0	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	294,509,981	3,489,821,763	(3,195,311,782)	(91.56)
Sub Total	6,282,287,064	5,987,777,083	294,509,981	4.91
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	0.00
Lain-lain	0	0	0	0.00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	6,282,287,064	5,987,777,083	294,509,981	4.91

TANGERANG, 30 APRIL 2021

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA
 CURUG



ASRI SANTOSA, S.T., S.Si.T., M.T.

NIP. 19710706 199301 1 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
WILAYAH/PROPINSI : 2900 BANTEN
SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
JENIS SAKTER : KP KANTOR PUSAT

KD. LAPORAN : LRPS.T01
TANGGAL : 28/04/2022
HAL : 1
PROG. ID : lu_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	TRANSAKSI KAS						
42	Penerimaan Dalam Negeri						
424	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	38,731,709,650	38,731,709,650	0	38,731,709,650	0.00
4241	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	0	38,731,709,650	38,731,709,650	0	38,731,709,650	0.00
42411	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	38,731,709,650	38,731,709,650	0	38,731,709,650	0.00
424112	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	0	38,731,709,650	38,731,709,650	0	38,731,709,650	0.00
	Jumlah Penerimaan 42411						
	Jumlah Penerimaan 4241						
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU						
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	14,022,099,500	14,022,099,500	0	14,022,099,500	0.00
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	14,022,099,500	14,022,099,500	0	14,022,099,500	0.00
	Jumlah Penerimaan 42431						
	Jumlah Penerimaan 4243						
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN						
42442	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	0	1,262,182,451	1,262,182,451	0	1,262,182,451	0.00
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	3,121,782,858	3,121,782,858	0	3,121,782,858	0.00
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	4,383,965,309	4,383,965,309	0	4,383,965,309	0.00
	Jumlah Penerimaan 42442						
	Jumlah Penerimaan 4244						
4249	Pendapatan BLU Lainnya						
42491	Pendapatan BLU Lainnya	0	374,576,446	374,576,446	0	374,576,446	0.00
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	1,298,487,751	1,298,487,751	0	1,298,487,751	0.00
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	1,673,064,197	1,673,064,197	0	1,673,064,197	0.00
	Jumlah Penerimaan 42491						

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
WILAYAH/PROVINSI : 2900 BANTEN
SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
JENIS SATKER : KP KANTOR PUSAT

KD. LAPORAN : LRPS.T01
TANGGAL : 28/04/2020
HAL : 2
PROG. ID : lu_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
42492	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	0	274,892,067	274,892,067	20,000,000	254,892,067	0.00
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	979,962,000	979,962,000	0	979,962,000	0.00
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	26,400,000	26,400,000	0	26,400,000	0.00
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	1,300,270,000	1,300,270,000	0	1,300,270,000	0.00
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	2,581,524,067	2,581,524,067	20,000,000	2,561,524,067	0.00
	Jumlah Penerimaan 42492	0	4,254,588,264	4,254,588,264	20,000,000	4,234,588,264	0.00
425	Jumlah Penerimaan 4249	0	61,392,362,723	61,392,362,723	20,000,000	61,372,362,723	0.00
4251	PENDAPATAN PNBP LAINNYA						
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klatim Asuransi BMN						
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	66,166,666	66,166,666	0	66,166,666	0.00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	66,166,666	66,166,666	0	66,166,666	0.00
42513	Jumlah Penerimaan 42512	0	133,359,296	133,359,296	0	133,359,296	0.00
425131	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN						
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	67,192,630	67,192,630	0	67,192,630	0.00
	Jumlah Penerimaan 42513	0	67,192,630	67,192,630	0	67,192,630	0.00
4259	Jumlah Penerimaan 4251	0	133,359,296	133,359,296	0	133,359,296	0.00
42591	Pendapatan Lain-Lain						
425911	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	0	7,037,256	7,037,256	0	7,037,256	0.00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	716,852,322	716,852,322	0	716,852,322	0.00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	723,889,578	723,889,578	0	723,889,578	0.00
	Jumlah Penerimaan 42591	0	723,889,578	723,889,578	0	723,889,578	0.00
	Jumlah Penerimaan 4259	0	857,248,874	857,248,874	0	857,248,874	0.00
	Jumlah Penerimaan 425	0	62,249,611,597	62,249,611,597	20,000,000	62,229,611,597	0.00
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	0	62,249,611,597	62,249,611,597	20,000,000	62,229,611,597	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
WILAYAH/PROPINSI : 2900 BANTEN
SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
JENIS SATKER : KP KANTOR PUSAT

KD. LAPORAN : LRPS.T01

TANGGAL : 28/04/202

HAL : 3

PROG. ID : lu_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	62,249,611,597	62,249,611,597	20,000,000	62,229,611,597	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	0	62,249,611,597	62,249,611,597	20,000,000	62,229,611,597	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	62,249,611,597	62,249,611,597	20,000,000	62,229,611,597	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 WILAYAH/PROVINSI : 2900 BANTEN
 SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, April 28,
 Halaman : 2
 Prog.Id : lu_trabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524111	Belanja Perjalanan Biasa	3.343.020.000	2.274.934.000	2.274.903.597	2.274.903.597	0	2.274.903.597	100.00	30.403
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3.343.020.000	2.274.934.000	2.274.903.597	2.274.903.597	0	2.274.903.597	100.00	30.403
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	30.362.620.000	20.766.100.000	20.764.436.397	20.764.436.397	0	20.764.436.397	99.99	1.663.603
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998.001	30.362.620.000	20.766.100.000	20.764.436.397	20.764.436.397	0	20.764.436.397	99.99	1.663.603
002	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi Udara								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional	36.000.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	100.00	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	36.000.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	36.000.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	100.00	0
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	61.200.000	24.480.000	24.480.000	24.480.000	0	24.480.000	100.00	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	329.450.000	32.850.000	32.850.000	32.850.000	0	32.850.000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	390.650.000	57.330.000	57.330.000	57.330.000	0	57.330.000	100.00	0
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75.600.000	52.200.000	52.200.000	52.200.000	0	52.200.000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	75.600.000	52.200.000	52.200.000	52.200.000	0	52.200.000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	502.250.000	120.330.000	120.330.000	120.330.000	0	120.330.000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998.002	502.250.000	120.330.000	120.330.000	120.330.000	0	120.330.000	100.00	0
003	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi Udara								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional	190.400.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100.00	0
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan								
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9.248.608.000	9.371.818.000	9.371.814.451	9.371.814.451	0	9.371.814.451	100.00	3.549

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 WILAYAH/PROVINSI : 2900 BANTEN
 SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, April 28,
 Halaman : 3
 Prog.Id : lu_Irabsktk

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMILAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMILAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMILAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	9,439,008,000	9,386,818,000	9,386,814,451	9,386,814,451	0	9,386,814,451	100.00	3,549
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	774,520,000	720,878,000	720,848,000	720,848,000	0	720,848,000	100.00	30,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,625,000,000	3,957,350,000	3,947,727,000	3,947,727,000	0	3,947,727,000	99.76	9,623,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,868,860,000	3,208,481,000	3,208,397,000	3,208,397,000	0	3,208,397,000	100.00	84,000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	157,000,000	156,950,000	156,950,000	0	156,950,000	99.97	50,000
	JUMILAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	17,268,380,000	8,043,709,000	8,033,922,000	8,033,922,000	0	8,033,922,000	99.88	9,787,000
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	968,948,000	540,135,000	540,034,000	540,034,000	0	540,034,000	99.98	101,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	3,227,192,000	0	0	0	0	0	0.00	0
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	366,250,000	366,250,000	366,250,000	0	366,250,000	100.00	0
	JUMILAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,196,140,000	906,385,000	906,284,000	906,284,000	0	906,284,000	99.99	101,000
5221	Belanja Jasa								
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	175,000,000	34,100,000	34,100,000	34,100,000	0	34,100,000	100.00	0
522131	Belanja Jasa Konsultansi	200,000,000	351,000,000	350,928,000	350,928,000	0	350,928,000	99.98	72,000
522141	Belanja Sewa	590,000,000	337,090,000	337,090,000	337,090,000	0	337,090,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	640,600,000	1,613,200,000	1,610,835,000	1,610,835,000	0	1,610,835,000	99.85	2,365,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	560,000,000	560,000,000	560,000,000	0	560,000,000	100.00	0
	JUMILAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,605,600,000	2,895,390,000	2,892,953,000	2,892,953,000	0	2,892,953,000	99.92	2,437,000
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,295,352,000	3,600,436,000	3,600,109,000	3,600,109,000	0	3,600,109,000	99.99	327,000
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	395,285,000	395,285,000	395,285,000	0	395,285,000	100.00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 WILAYAH/PROVINSI : 2900 BANTEN
 SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, April 28,
 Halaman : 5
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	499,550,000	171,000,000	166,500,000	166,500,000	0	166,500,000	97.37	4,500,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	499,550,000	171,000,000	166,500,000	166,500,000	0	166,500,000	97.37	4,500,000	
5221	Belanja Jasa									
522141	Belanja Sewa	1,240,400,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	100.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,240,400,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	100.00	0	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri									
524111	Belanja Perjalanan Biasa	2,349,600,000	474,450,000	420,419,068	420,419,068	0	420,419,068	88.61	54,030,932	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,349,600,000	474,450,000	420,419,068	420,419,068	0	420,419,068	88.61	54,030,932	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	19,829,040,000	4,928,070,000	4,841,376,418	4,841,376,418	0	4,841,376,418	98.24	86,693,582	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998 004	19,829,040,000	4,928,070,000	4,841,376,418	4,841,376,418	0	4,841,376,418	98.24	86,693,582	
005	Pengelolaan Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat									
52	BELANJA BARANG									
5218	Belanja Barang Persediaan									
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	132,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000	100.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	132,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000	100.00	0	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri									
524111	Belanja Perjalanan Biasa	99,840,000	49,920,000	49,565,620	49,565,620	0	49,565,620	99.29	354,380	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	99,840,000	49,920,000	49,565,620	49,565,620	0	49,565,620	99.29	354,380	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	231,840,000	121,920,000	121,565,620	121,565,620	0	121,565,620	99.71	354,380	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998 005	231,840,000	121,920,000	121,565,620	121,565,620	0	121,565,620	99.71	354,380	
006	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga									
52	BELANJA BARANG									
5212	Belanja Barang Non Operasional									
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	757,875,000	748,750,000	735,222,564	735,222,564	0	735,222,564	98.19	13,527,436	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 WILAYAH/PROVINSI : 2900 BANTEN
 SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, April 28,
 Halaman : 6
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	757,875,000	748,750,000	735,222,564	735,222,564	0	735,222,564	98.19	13,527,436
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	172,050,000	50,000,000	49,995,000	49,995,000	0	49,995,000	99.99	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	172,050,000	50,000,000	49,995,000	49,995,000	0	49,995,000	99.99	5,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	419,640,000	21,750,000	21,615,700	21,615,700	0	21,615,700	99.38	134,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	419,640,000	21,750,000	21,615,700	21,615,700	0	21,615,700	99.38	134,300
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	300,435,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	300,435,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,650,000,000	820,500,000	806,833,264	806,833,264	0	806,833,264	98.33	13,666,736
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998.006	1,650,000,000	820,500,000	806,833,264	806,833,264	0	806,833,264	98.33	13,666,736
007	Penelitian Bidang Transportasi								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	1,520,200,000	69,720,000	69,719,000	69,719,000	0	69,719,000	100.00	1,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	96,400,000	14,700,000	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,336,400,000	1,063,793,000	1,063,769,100	1,063,769,100	0	1,063,769,100	100.00	23,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,953,000,000	1,148,213,000	1,148,188,100	1,148,188,100	0	1,148,188,100	100.00	24,900
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	196,825,000	29,775,000	29,775,000	29,775,000	0	29,775,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	196,825,000	29,775,000	29,775,000	29,775,000	0	29,775,000	100.00	0
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	320,000,000	53,600,000	53,600,000	53,600,000	0	53,600,000	100.00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
WILAYAH/PROVINSI : 2900 BANTEN
SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, April 28,
Halaman : 7
Prog.Id : lu_trabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	320.000.000	53.600.000	53.600.000	53.600.000	0	53.600.000	100.00	0	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri									
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000	0	1.520.000	100.00	0	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	153.440.000	0	0	0	0	0	0.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	153.440.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	0	1.520.000	100.00	0	
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri									
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3.623.265.000	1.233.108.000	1.233.083.100	1.233.083.100	0	1.233.083.100	100.00	24.900	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998 007	3.623.265.000	1.233.108.000	1.233.083.100	1.233.083.100	0	1.233.083.100	100.00	24.900	
008	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi									
52	BELANJA BARANG									
5212	Belanja Barang Non Operasional									
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	6.750.000	6.750.000	6.750.000	0	6.750.000	100.00	0	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	600.000.000	193.735.000	193.721.000	193.721.000	0	193.721.000	99.99	14.000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	600.000.000	200.485.000	200.471.000	200.471.000	0	200.471.000	99.99	14.000	
5218	Belanja Barang Persediaan									
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	250.000.000	30.072.000	30.072.000	30.072.000	0	30.072.000	100.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	250.000.000	30.072.000	30.072.000	30.072.000	0	30.072.000	100.00	0	
5221	Belanja Jasa									
522151	Belanja Jasa Profesi	0	84.000.000	84.000.000	84.000.000	0	84.000.000	100.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	84.000.000	84.000.000	84.000.000	0	84.000.000	100.00	0	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri									
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0	76.132.721	76.132.721	76.132.721	0	76.132.721	99.98	17.279	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESOLON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
WILAYAH/PROVINSI : 2900 BANTEN
SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, April 28,
Halaman : 8
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	76,150,000	76,132,721	76,132,721	0	76,132,721	99.98	17,279	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	850,000,000	390,707,000	390,675,721	390,675,721	0	390,675,721	99.99	31,279	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998.008	850,000,000	390,707,000	390,675,721	390,675,721	0	390,675,721	99.99	31,279	
009	Evaluasi Pasca Diklat									
52	BELANJA BARANG									
5218	Belanja Barang Persediaan	146,880,000	70,200,000	70,170,000	70,170,000	0	70,170,000	99.96	30,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	146,880,000	70,200,000	70,170,000	70,170,000	0	70,170,000	99.96	30,000	
5241	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	146,880,000	70,200,000	70,170,000	70,170,000	0	70,170,000	99.96	30,000	
524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	147,960,000	41,100,000	41,100,000	41,100,000	0	41,100,000	100.00	0	
	Belanja Perjalanan Biasa	147,960,000	41,100,000	41,100,000	41,100,000	0	41,100,000	100.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	147,960,000	41,100,000	41,100,000	41,100,000	0	41,100,000	100.00	0	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	294,840,000	111,300,000	111,270,000	111,270,000	0	111,270,000	99.97	30,000	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998.009	294,840,000	111,300,000	111,270,000	111,270,000	0	111,270,000	99.97	30,000	
010	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi									
52	BELANJA BARANG									
5212	Belanja Barang Non Operasional	300,260,000	74,160,000	73,610,045	73,610,045	0	73,610,045	99.26	549,955	
521211	Belanja Bahan	300,260,000	74,160,000	73,610,045	73,610,045	0	73,610,045	99.26	549,955	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	100,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	400,260,000	74,160,000	73,610,045	73,610,045	0	73,610,045	99.26	549,955	
5218	Belanja Barang Persediaan									
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	765,000,000	500,500,000	500,495,000	500,495,000	0	500,495,000	100.00	5,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	765,000,000	500,500,000	500,495,000	500,495,000	0	500,495,000	100.00	5,000	
5221	Belanja Jasa									
522151	Belanja Jasa Profesi	658,600,000	31,800,000	31,500,000	31,500,000	0	31,500,000	99.06	300,000	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
WILAYAH/PROVINSI : 2900 BANTEN
SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, April 28,
Halaman : 11
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524111	Belanja Perjalanan Biasa	104,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	267,820,000	48,050,000	48,050,000	48,050,000	0	48,050,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	371,820,000	74,050,000	74,050,000	74,050,000	0	74,050,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	826,000,000	367,480,000	367,475,000	367,475,000	0	367,475,000	100.00	5,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998.013	826,000,000	367,480,000	367,475,000	367,475,000	0	367,475,000	100.00	5,000
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,913,950,000	0	0	0	0	0	0.00	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,913,950,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,913,950,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5361	Belanja Modal Lainnya								
536111	Belanja Modal Lainnya	2,005,700,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	2,005,700,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	3,919,650,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998.951	3,919,650,000	0	0	0	0	0	0.00	0
970	Layanan Dukungan Manajemen Sektter								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional	200,000,000	20,000,000	19,994,000	19,994,000	0	19,994,000	99.97	6,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	200,000,000	20,000,000	19,994,000	19,994,000	0	19,994,000	99.97	6,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	200,000,000	20,000,000	19,994,000	19,994,000	0	19,994,000	99.97	6,000
5212	Belanja Barang Non Operasional	370,000,000	576,250,000	576,222,000	576,222,000	0	576,222,000	100.00	28,000
521211	Belanja Bahan	370,000,000	576,250,000	576,222,000	576,222,000	0	576,222,000	100.00	28,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	545,000,000	544,990,000	544,990,000	0	544,990,000	100.00	10,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	370,000,000	1,121,250,000	1,121,212,000	1,121,212,000	0	1,121,212,000	100.00	38,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 WILAYAH/PROPINSI : 2900 BANTEN
 SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, April 28,
 Halaman : 12
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,576,880,000	1,337,880,000	1,337,768,000	1,337,768,000	0	1,337,768,000	99.99	112,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,576,880,000	1,337,880,000	1,337,768,000	1,337,768,000	0	1,337,768,000	99.99	112,000
5221	Belanja Jasa								
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	750,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	126,000,000	129,500,000	128,500,000	128,500,000	0	128,500,000	99.23	1,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	876,000,000	349,500,000	348,500,000	348,500,000	0	348,500,000	99.71	1,000,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	646,170,000	1,116,740,000	1,115,140,970	1,115,140,970	0	1,115,140,970	99.86	1,599,030
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,298,910,000	1,635,575,000	1,635,514,777	1,635,514,777	0	1,635,514,777	100.00	60,223
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,945,080,000	2,752,315,000	2,750,655,747	2,750,655,747	0	2,750,655,747	99.94	1,659,253
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,967,960,000	5,680,945,000	5,578,129,747	5,578,129,747	0	5,578,129,747	99.95	2,815,253
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998.970	5,967,960,000	5,680,945,000	5,578,129,747	5,578,129,747	0	5,578,129,747	99.95	2,815,253
994	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	15,513,527,000	11,664,829,000	11,581,585,380	11,581,585,380	(12,888,300)	11,568,697,080	99.18	96,131,920
511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	199,000	199,000	166,592	166,592	(5,706)	160,886	80.85	38,114
511121	Belanja Tunj. Suami/Isiri PNS	1,225,577,000	941,742,000	931,213,330	931,213,330	(832,450)	930,380,880	98.79	11,361,120
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	254,122,000	216,567,000	214,536,428	214,536,428	(184,910)	214,351,518	98.98	2,215,482
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	131,980,000	140,544,000	132,040,000	132,040,000	(370,000)	131,670,000	93.69	8,874,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
WILAYAH/PROVINSI : 2900 BANTEN
SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, April 28,
Halaman : 13
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	901,390,000	848,524,000	842,095,000	842,095,000	0	842,095,000	99.24	6,429,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	81,276,000	50,840,000	49,404,203	49,404,203	(108,350)	49,295,853	96.96	1,544,147	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	748,060,000	540,920,000	532,938,780	532,938,780	(434,520)	532,504,260	98.44	8,415,740	
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,991,230,000	2,007,130,000	1,840,289,050	1,840,289,050	0	1,840,289,050	91.69	166,840,950	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	467,760,000	311,205,000	306,640,000	306,640,000	(6,105,050)	300,534,950	96.57	10,670,050	
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	2,541,708,000	2,106,000,000	1,929,546,020	1,929,546,020	(1,857,420)	1,927,688,600	91.53	178,311,400	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	23,856,829,000	18,828,500,000	18,360,454,783	18,360,454,783	(22,786,706)	18,337,668,077	97.51	490,831,923	
5122	Belanja Lembur									
512211	Belanja Uang Lembur	645,840,000	514,960,000	431,011,000	431,011,000	0	431,011,000	83.70	83,949,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	645,840,000	514,960,000	431,011,000	431,011,000	0	431,011,000	83.70	83,949,000	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	24,502,669,000	19,343,460,000	18,791,465,783	18,791,465,783	(22,786,706)	18,768,679,077	97.15	574,780,923	
52	BELANJA BARANG									
5211	Belanja Barang Operasional									
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	10,015,200,000	9,840,200,000	9,840,199,000	9,840,199,000	0	9,940,199,000	100.00	1,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	362,520,000	353,700,000	353,688,000	353,688,000	0	353,688,000	100.00	12,000	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	10,377,720,000	10,293,900,000	10,293,887,000	10,293,887,000	0	10,293,887,000	100.00	13,000	
5212	Belanja Barang Non Operasional									
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	731,500,000	806,500,000	806,500,000	806,500,000	0	806,500,000	100.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	731,500,000	806,500,000	806,500,000	806,500,000	0	806,500,000	100.00	0	
5218	Belanja Barang Persediaan									
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	458,500,000	374,200,000	374,200,000	374,200,000	0	374,200,000	100.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	458,500,000	374,200,000	374,200,000	374,200,000	0	374,200,000	100.00	0	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 WILAYAH/PROVINSI : 2900 BANTEN
 SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, April 28,
 Halaman : 16
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	23,815,000	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000	69.28	7,315,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	31,225,910,000	17,491,186,000	9,456,527,230	9,456,527,230	0	9,456,527,230	54.06	8,034,658,770
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	31,225,910,000	17,491,186,000	9,456,527,230	9,456,527,230	0	9,456,527,230	54.06	8,034,658,770
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998.003	31,225,910,000	17,491,186,000	9,456,527,230	9,456,527,230	0	9,456,527,230	54.06	8,034,658,770
006	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga								
52	BELANJA BARANG								
5251	Belanja Barang BLU								
525115	Belanja Perjalanan	200,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	200,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	200,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998.006	200,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
994	Layanan Perkantoran								
52	BELANJA BARANG								
5251	Belanja Barang BLU								
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	29,470,000,000	27,720,000,000	17,640,241,453	17,640,241,453	0	17,640,241,453	63.64	10,079,758,547
525113	Belanja Jasa	137,040,000	137,040,000	99,379,496	99,379,496	0	99,379,496	72.52	37,660,504
525114	Belanja Pemeliharaan	1,500,000,000	1,801,000,000	1,795,969,700	1,795,969,700	0	1,795,969,700	99.72	5,030,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	31,107,040,000	29,658,040,000	19,535,590,649	19,535,590,649	0	19,535,590,649	65.87	10,122,449,351
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	31,107,040,000	29,658,040,000	19,535,590,649	19,535,590,649	0	19,535,590,649	65.87	10,122,449,351
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3998.994	31,107,040,000	29,658,040,000	19,535,590,649	19,535,590,649	0	19,535,590,649	65.87	10,122,449,351
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3998	105,000,000,000	80,061,926,000	61,077,852,742	61,077,852,742	0	61,077,852,742	76.29	18,984,073,258
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 10.06.05	105,000,000,000	80,061,926,000	61,077,852,742	61,077,852,742	0	61,077,852,742	76.29	18,984,073,258
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10.06	105,000,000,000	80,061,926,000	61,077,852,742	61,077,852,742	0	61,077,852,742	76.29	18,984,073,258

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 12
WILAYAH/PROPINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, April 28,
Halaman : 17
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	105,000,000,000	80,061,926,000	61,077,852,742	61,077,852,742	0	61,077,852,742	76.29	18,984,073,258	
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	105,000,000,000	80,061,926,000	61,077,852,742	61,077,852,742	0	61,077,852,742	76.29	18,984,073,258	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 06	105,000,000,000	80,061,926,000	61,077,852,742	61,077,852,742	0	61,077,852,742	76.29	18,984,073,258	
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KP	296,958,725,000	206,231,638,000	186,574,797,873	186,574,797,873	(22,786,706)	186,552,011,167	90.47	19,679,626,833	
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	296,958,725,000	206,231,638,000	186,574,797,873	186,574,797,873	(22,786,706)	186,552,011,167	90.47	19,679,626,833	
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	296,958,725,000	206,231,638,000	186,574,797,873	186,574,797,873	(22,786,706)	186,552,011,167	90.47	19,679,626,833	

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKT
 Tanggal : 28-04-2021
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROPINSI : 2900 **BANTEN**
SATUAN KERJA : 288127 **POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111826	Kas Lainnya di BLU	81,701,000	
0	111911	Kas dan Bank - BLU	6,282,287,064	
0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	9,680,670,100	
0	115719	Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	4,282,761,000	
0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		357,559,853
0	116619	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya		1,486,015,775
0	117111	Barang Konsumsi	11,883,600	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	875,000	
0	117114	Suku Cadang	75,732,527,432	
0	117131	Bahan Baku	4,623,807,035	
0	117199	Persediaan Lainnya	526,517,278	
0	132111	Peralatan dan Mesin	2,518,564,270,529	
0	133111	Gedung dan Bangunan	380,404,636,398	
0	134111	Jalan dan Jembatan	2,145,871,000	
0	134112	Irigasi	1,619,800,000	
0	134113	Jaringan	19,727,241,534	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	31,390,846,829	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		1,787,647,791,430
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		31,169,980,745
0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		962,032,300
0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		202,867,680
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		6,919,531,266
0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		99,610,000
0	162121	Hak Cipta	31,247,000	
0	162151	Software	17,133,985,300	
0	162161	Lisensi	3,200,000	
0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	4,238,430,047	
0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	12,839,894,845	
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	9,632,565,000	
0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	10,222,960,000	
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		6,614,930,897
0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta		3,794,350
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software		2,446,000,000

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKT
 Tanggal : 28-04-2021
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROPINSI : 2900 **BANTEN**
SATUAN KERJA : 288127 **POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi		3,200,000
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		665,377,086
0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU		1,217,314,439
0	212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU		81,701,000
0	313211	Transfer Keluar	7,058,149,417	
0	313221	Transfer Masuk		5,372,590,146
0	391111	Ekuitas		1,388,882,632,173
0	391114	Revaluasi Aset Tetap		2,406,543,000
0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,352,914,817	
0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	24,333,000	
3	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		47,174,726,000
3	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha		16,592,400,500
3	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN		125,496,945,131
3	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	22,786,706	
3	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga		1,262,182,451
3	424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU		3,121,782,858
3	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		374,576,446
3	424919	Pendapatan Lain-lain BLU		1,298,487,751
3	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		274,892,067
3	424922	Pengembalian Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	20,000,000	
3	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		979,962,000
3	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin		26,400,000
3	424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya		1,300,270,000
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		66,166,666
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		67,192,630
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		7,037,256
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		716,852,322
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		3,649,061,769
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	11,563,329,580	
3	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS		12,888,300
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	165,961	
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		5,706
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	929,358,340	

**NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 28-04-2021
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
WILAYAH/PROPINSI : 2900 BANTEN
SATUAN KERJA : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS		832,450
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	214,209,916	
3	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS		184,910
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	132,040,000	
3	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS		370,000
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	837,445,000	
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	48,853,203	
3	511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS		108,350
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	532,938,780	
3	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS		434,520
3	511129	Beban Uang Makan PNS	1,838,959,050	
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	306,455,000	
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		6,105,050
3	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	1,929,546,020	
3	511153	Pengembalian Beban Tunjangan Profesi Dosen		1,857,420
3	512211	Beban Uang Lembur	431,011,000	
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	9,940,199,000	
3	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	15,000,000	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	353,688,000	
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	12,647,177,401	
3	521211	Beban Bahan	3,169,829,645	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	10,364,302,000	
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	13,288,181,963	
3	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,273,492,000	
3	522111	Beban Langganan Listrik	4,671,594,438	
3	522112	Beban Langganan Telepon	108,672,125	
3	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,678,100,000	
3	522131	Beban Jasa Konsultan	350,928,000	
3	522141	Beban Sewa	782,277,000	
3	522151	Beban Jasa Profesi	1,984,535,000	
3	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	560,000,000	
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,656,668,250	
3	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	790,460,000	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,507,062,000	

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKT
 Tanggal : 28-04-2021
 Halaman : 4

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROPINSI : 2900 **BANTEN**
SATUAN KERJA : 288127 **POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	5,016,897,926	
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,626,599,675	
3	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	18,476,881,792	
3	525112	Beban Barang	19,218,448,488	
3	525113	Beban Jasa	2,894,599,496	
3	525114	Beban Pemeliharaan	810,468,700	
3	525115	Beban Perjalanan	717,389,640	
3	525118	Beban Ketersediaan Layanan BLU	165,044,900	
3	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	14,389,176,065	
3	525152	Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	3,280,050,000	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	124,816,270,488	
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,050,830,702	
3	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	299,054,150	
3	591312	Beban Penyusutan Irigasi	57,719,360	
3	591313	Beban Penyusutan Jaringan	729,135,609	
3	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	446,400	
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	114,328,626	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	7,348,095,790	
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	460,432,100	
3	593114	Beban Persediaan suku cadang	5,433,289,795	
3	593131	Beban Persediaan bahan baku	4,886,888,396	
3	593149	Beban Persediaan Lainnya	467,008,415	
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1,234,628,109	
3	594612	Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		43,329,203
3	594619	Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	697,897,775	
3	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	3,403,052,022	
3	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	857,248,874	
		J U M L A H	3,439,014,523,896	3,439,014,523,896



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-150015/WPB.10/KP.127/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG (288127) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara TANGERANG, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2020.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	206,231,638,000	206,231,638,000	0
2	Belanja	186,574,797,873	186,574,797,873	0
3	Pengembalian Belanja	-22,786,706	-22,786,706	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	62,249,611,597	62,249,611,597	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-20,000,000	-20,000,000	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	6,282,287,064	6,282,287,064	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

AHMAD YANI
NIP.196510101985031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Ketua PPIC

ASRI SANTOSA
NIP.197107061993011001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG (288127)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 206,231,638,000

SAI/SA-BUN : 206,231,638,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 186,574,797,873

SAI/SA-BUN : 186,574,797,873

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -22,786,706

SAI/SA-BUN : -22,786,706

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 62,249,611,597

SAI/SA-BUN : 62,249,611,597

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : -20,000,000

SAI/SA-BUN : -20,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 6,282,287,064

SAI/SA-BUN : 6,282,287,064

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

AHMAD YANI
NIP.196510101985031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Ketua PPIC

ASRI SANTOSA
NIP.197107061993011001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JL. RAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp. (021) 598-2203/04/05
Fax. (021) 598-2234

email : ppi@ppicurug.ac.id
website : <http://www.ppicurug.ac.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPI Curug) BPSDM Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan BPSDM Kementerian Perhubungan RI. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen PPI Curug.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Tangerang, 29 Januari 2021
Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (SPI)
Pelaksana Harian

A Nugroho Budi R., S.Pd., S.SiT., M.T
NIP. 19570112 198303 1 001



Rekening Koran (Account Statement)

Periode : From 01 December 2020
To 31 December 2020
Account No : 1760000874030 - RPL 127 STPI CURUG U
Currency : IDR
Branch : KCP Tangerang Curug
Opening Balance : 0.00

<i>Date & Time</i>	<i>Value Date</i>	<i>Description</i>	<i>Reference No.</i>	<i>Debit</i>	<i>Credit</i>	<i>Balance</i>
01/12/2020 13:46:39	01/12/2020	HY 689490 Transfer		0.00	872,081,894.00	872,081,894.00
01/12/2020 14:20:16	01/12/2020	CK 506313-HI 506313 Tarik Tunai 00506313		872,081,894.00	0.00	0.00
04/12/2020 10:49:05	04/12/2020	HY 689491 Transfer		0.00	2,293,050,759.00	2,293,050,759.00
04/12/2020 12:08:34	04/12/2020	CK 506314-HI 506314 Tarik Tunai 00506314		2,293,050,759.00	0.00	0.00
14/12/2020 13:05:15	14/12/2020	HY 689493 SPT 0032 Transfer		0.00	1,925,694,900.00	1,925,694,900.00
14/12/2020 14:15:23	14/12/2020	CK 506315-HI 506315 Tarik Tunai 00506315		1,925,694,900.00	0.00	0.00
17/12/2020 12:09:35	17/12/2020	HY 689494 SPT 033 REMUN DEWAS Transfer		0.00	65,988,712.00	65,988,712.00
17/12/2020 13:39:15	17/12/2020	SPT 034 PNGMBALIAN SWAB Transfer		0.00	168,000,000.00	233,988,712.00
17/12/2020 14:25:07	17/12/2020	CK 506316-HI 506316 Tarik Tunai 00506316		65,988,712.00	0.00	168,000,000.00
17/12/2020 14:25:44	17/12/2020	CK 506317-HI 506317 Tarik Tunai 00506317		168,000,000.00	0.00	0.00
21/12/2020 13:46:20	21/12/2020	HY 689497 Transfer		0.00	1,074,388,657.00	1,074,388,657.00
21/12/2020 14:34:11	21/12/2020	CK 506319-HI 506319 Tarik Tunai 00506319		1,074,388,657.00	0.00	0.00
22/12/2020 12:08:41	22/12/2020	HY 689496 Transfer		0.00	3,131,610,646.00	3,131,610,646.00
22/12/2020 14:27:09	22/12/2020	CK 506318-HI 506318 Tarik Tunai 00506318		3,131,610,646.00	0.00	0.00
28/12/2020 11:17:47	28/12/2020	REMUN P2 JULI-SEPT Transfer		0.00	1,046,414,438.00	1,046,414,438.00
28/12/2020 11:37:43	28/12/2020	SPT 038 Transfer		0.00	387,977,220.00	1,434,391,658.00
28/12/2020 11:56:02	28/12/2020	CK 506320-HI 506320 Tarik Tunai 00506320		1,046,414,438.00	0.00	387,977,220.00
28/12/2020 12:15:31	28/12/2020	CK 506321-HI 506321 Tarik Tunai 00506321		387,977,220.00	0.00	0.00
30/12/2020 09:43:47	30/12/2020	SPT 0039 Transfer		0.00	1,309,538,368.00	1,309,538,368.00
30/12/2020 12:05:11	30/12/2020	HI 507003 Transfer		0.00	693,031,548.00	2,002,569,916.00
30/12/2020 12:11:	30/12/2020	CK 506322-HI 506322		1,309,538,368.00	0.00	693,031,548.00



Rekening Koran (Account Statement)

Periode : From 01 December 2020
To 31 December 2020
Account No : 1760000874030 - RPL 127 STPI CURUG U
Currency : IDR
Branch : KCP Tangerang Curug

<i>Date & Time</i>	<i>Value Date</i>	<i>Description</i>	<i>Reference No.</i>	<i>Debit</i>	<i>Credit</i>	<i>Balance</i>
39		Tarik Tunai 00506322				
30/12/2020 14:21:19	30/12/2020	CK 506323-HI 506323 Tarik Tunai 00506323		693,031,548.00	0.00	0.00

No of Credit	11
Total Amount Credited	12,967,777,142.00
No of Debit	11
Total Amount Debited	12,967,777,142.00
Closing Balance	0.00



Rekening Koran (Account Statement)

Periode : From 01 December 2020
To 31 December 2020
Account No : 1760000874055 - RPL 127 STPI CURUG U
Currency : IDR
Branch : KCP Tangerang Curug

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
29/12/2020 10:22:31	29/12/2020	UBP60108877302FFFFFFF88773151119 16 9200000		0.00	9,200,000.00	1,743,047,097.61
29/12/2020 10:29:13	29/12/2020	UBP60148877301FFFFFFF88773343181 30		0.00	11,700,000.00	1,754,747,097.61
29/12/2020 10:44:33	29/12/2020	UBP60108877302FFFFFFF88773253180 20 11700000		0.00	11,700,000.00	1,766,447,097.61
29/12/2020 11:08:16	29/12/2020	UBP60148877301FFFFFFF88773343181 38		0.00	11,700,000.00	1,778,147,097.61
29/12/2020 11:18:36	29/12/2020	UBP60108877302FFFFFFF88773224170 49 10000000		0.00	10,000,000.00	1,788,147,097.61
29/12/2020 12:38:03	29/12/2020	UBP60108877302FFFFFFF88773343180 26 11700000		0.00	11,700,000.00	1,799,847,097.61
29/12/2020 13:04:05	29/12/2020	UBP60108877302FFFFFFF88773343181 53 11700000		0.00	11,700,000.00	1,811,547,097.61
29/12/2020 13:25:22	29/12/2020	UBP60228877301FFFFFFF88773343180 27 ATMB trf Credit DCSD001 /1691885496/ATB-0000000000002		0.00	11,700,000.00	1,823,247,097.61
29/12/2020 13:42:07	29/12/2020	UBP60108877302FFFFFFF88773343180 15 11700000		0.00	11,700,000.00	1,834,947,097.61
29/12/2020 14:11:47	29/12/2020	PEMINDAHBUKUAN Inward RTGS RPL 127 STPI utk Dana KelolaanPT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK		0.00	885,069,067.00	2,720,016,164.61
29/12/2020 14:41:51	29/12/2020	RPL 127 STPI UTK DANA KELOLAAN - 009		0.00	6,995,660.00	2,727,011,824.61
29/12/2020 17:47:46	29/12/2020	UBP60148877301FFFFFFF88773150619 26		0.00	28,780,000.00	2,755,791,824.61
30/12/2020 01:35:41	30/12/2020	UBP60148877301FFFFFFF88773150919 36		0.00	5,000,000.00	2,760,791,824.61
30/12/2020 09:41:49	30/12/2020	HI 505671 Transfer		0.00	1,129,762,000.00	3,890,553,824.61
30/12/2020 09:43:47	30/12/2020	CK 507002-SPT 0039 Transfer 00507002		1,309,538,368.00	0.00	2,581,015,456.61
30/12/2020 10:36:35	30/12/2020	UBP60108877302FFFFFFF88773224170 12		0.00	16,740,000.00	2,597,755,456.61



Rekening Koran (Account Statement)

Periode : From 01 December 2020
To 31 December 2020
Account No : 1760000874055 - RPL 127 STPI CURUG U
Currency : IDR
Branch : KCP Tangerang Curug

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
		16740000				
30/12/2020 11:13:58	30/12/2020	UBP60108877302FFFFFFF88773253180 18 11900000		0.00	11,900,000.00	2,609,655,456.61
30/12/2020 11:49:21	30/12/2020	UBP60108877302FFFFFFF88773343181 55 11700000		0.00	11,700,000.00	2,621,355,456.61
30/12/2020 12:05:11	30/12/2020	CK 507003-HI 507003 Transfer 00507003		693,031,548.00	0.00	1,928,323,908.61
30/12/2020 13:21:49	30/12/2020	UBP60188877301FFFFFFF88773343181 60 MVA-Inwrd CN pembayaran semester 5 STPI a/n Muham4880 20201230000657881586		0.00	11,700,000.00	1,940,023,908.61
31/12/2020 08:40:45	31/12/2020	UBP60228877301FFFFFFF88773343181 57 ATMB trf Credit OM360451 /0838032823/ATB-00000000000004		0.00	13,600,000.00	1,953,623,908.61
31/12/2020 11:33:21	31/12/2020	UBP60148877301FFFFFFF88773343180 24		0.00	11,700,000.00	1,965,323,908.61
31/12/2020 12:03:15	31/12/2020	UBP60148877301FFFFFFF88773413180 32		0.00	9,200,000.00	1,974,523,908.61
31/12/2020 12:12:49	31/12/2020	UBP60118877301FFFFFFF88773224180 42 13600000		0.00	13,600,000.00	1,988,123,908.61
31/12/2020 23:59:00	31/12/2020	Bunga		0.00	3,260,122.67	1,991,384,031.28

No of Credit	343
Total Amount Credited	10,765,418,894.05
No of Debit	11
Total Amount Debited	12,967,777,142.00
Closing Balance	1,991,384,031.28



Rekening Koran (Account Statement)

Periode : From 01 December 2020
To 31 December 2020
Account No : 1760000874022 - BPG 127 STPI CURUG
Currency : IDR
Branch : KCP Tangerang Curug

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
17/12/2020 09:39:40	17/12/2020	SPAN 201271303014282000001 MCM InhouseTrf Tahun 2020 tanggal 02 September 2020 (H	00001	0.00	18,240,000.00	2,777,661,843.00
17/12/2020 09:39:40	17/12/2020	SPAN 201271303014283000001 MCM InhouseTrf Tahun 2020 tanggal 02 September 2020 (H	00001	0.00	18,810,000.00	2,796,471,843.00
17/12/2020 09:39:40	17/12/2020	SPAN 201271303014280000001 MCM InhouseTrf hun 2020 tanggal 08 Januari 2020 (Honor	00001	0.00	134,520,000.00	2,930,991,843.00
17/12/2020 09:39:40	17/12/2020	SPAN 201271303014286000001 MCM InhouseTrf Tahun 2020 tanggal 02 September 2020 (H	00001	0.00	217,740,000.00	3,148,731,843.00
17/12/2020 14:29:35	17/12/2020	CK 506468-HI 506468 Tarik Tunai 00506468		2,688,599,343.00	0.00	460,132,500.00
18/12/2020 08:48:47	18/12/2020	SPAN 201271303014367000001 MCM InhouseTrf 118 Tahun 2020 tanggal 02 Seeptember 20	00001	0.00	6,270,000.00	466,402,500.00
18/12/2020 08:48:50	18/12/2020	SPAN 201271303014365000001 MCM InhouseTrf 118 Tahun 2020 tanggal 02 September Tah	00001	0.00	11,400,000.00	477,802,500.00
18/12/2020 08:52:19	18/12/2020	SPAN 201271303014368000001 MCM InhouseTrf Tahun 2020 tanggal 02 September 2020 (H	00001	0.00	81,937,500.00	559,740,000.00
18/12/2020 08:53:16	18/12/2020	SPAN 201271303014366000001 MCM InhouseTrf 426 Tahun 2020 tanggal 14 Desember Tahu	00001	0.00	199,500,000.00	759,240,000.00
21/12/2020 13:45:14	21/12/2020	CK 506469-HI 506469 Tarik Tunai 00506469		759,240,000.00	0.00	0.00
31/12/2020 23:59:00	31/12/2020	Bunga		0.00	509,855.26	509,855.26
31/12/2020 23:59:59	31/12/2020	DARI 1760000874022 KE 0700005719294 Transfer bunga		509,855.26	0.00	0.00

No of Credit	88
Total Amount Credited	6,181,488,582.26
No of Debit	9
Total Amount Debited	6,678,152,956.26
Closing Balance	0.00



Rekening Koran (Account Statement)

Periode : From 01 December 2020
To 31 December 2020
Account No : 1760000874071 - RPL 127 STPI CURUG U
Currency : IDR
Branch : KCP Tangerang Curug
Opening Balance : 2,575,561,708.11

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
01/12/2020 10:06:55	01/12/2020	PMB FIRE GROUND STPI Setor Tunai		0.00	2,600,000.00	2,578,161,708.11
07/12/2020 14:56:02	07/12/2020	HI-B-2020-00004008 KLINIK KESEHA Inward RTGS ASURANSI RELIANCE INDONESIA PT. BANK CIMB NIAGA		0.00	158,550,000.00	2,736,711,708.11
14/12/2020 13:16:06	14/12/2020	CK 505669-HI 505669 Transfer 00505669		2,531,646,707.00	0.00	205,065,001.11
15/12/2020 10:47:22	15/12/2020	AP - I KANTOR PUSAT (O) - 009		0.00	329,381,000.00	534,446,001.11
16/12/2020 11:55:01	16/12/2020	SEWA HANGGAR BLN NOV - DES 2020 Setor Tunai		0.00	71,904,000.00	606,350,001.11
16/12/2020 14:06:00	16/12/2020	BY PENDIDIKAN SEM II DAN II UTK 9 SSW ST Transfer		0.00	1,417,850,000.00	2,024,200,001.11
17/12/2020 09:50:24	17/12/2020	Setor Tunai		0.00	98,300,000.00	2,122,500,001.11
18/12/2020 15:59:18	18/12/2020	PT TJP Pembayaran PPC an Dicky Fairuz Ra MCM InhouseTrf DARI RIVO ARLIANTO	an Dicky Fairuz Ra	0.00	36,000,000.00	2,158,500,001.11
20/12/2020 15:11:06	20/12/2020	Pembayaran PPC sim 737 MCM InhouseTrf DARI ARIEF YULIANTO	7	0.00	36,000,000.00	2,194,500,001.11
25/12/2020 16:44:11	25/12/2020	14 14 MCM InhouseTrf DARI BPG: 133 DIT.	14	0.00	199,450,000.00	2,393,950,001.11
25/12/2020 16:58:44	25/12/2020	13 13 MCM InhouseTrf DARI BPG: 133 DIT.	13	0.00	199,450,000.00	2,593,400,001.11
28/12/2020 10:38:22	28/12/2020	DANA KELOLAAN BLU (AVSEC) Setor Tunai		0.00	198,112,000.00	2,791,512,001.11
28/12/2020 11:11:35	28/12/2020	CK 505670-HI 505670 Transfer 00505670		1,980,285,000.00	0.00	811,227,001.11
28/12/2020 12:16:27	28/12/2020	PKP-PK Setor Tunai		0.00	163,000,000.00	974,227,001.11
28/12/2020 21:23:26	28/12/2020	09 09 MCM InhouseTrf DARI BPG: 133 DIT.	09	0.00	199,450,000.00	1,173,677,001.11
29/12/2020 11:05:49	29/12/2020	1500176290 150017629083002020 MCM InhouseTrf DARI SMART TELECOM	150017629083002020	0.00	17,600,000.00	1,191,277,001.11
29/12/2020 16:59:43	29/12/2020	SEWA TANAH AN CAPT. AVIRIANTO S MCM InhouseTrf DARI FERI SATRIA WIBAWA	VIRIANTO S	0.00	3,360,000.00	1,194,637,001.11



Rekening Koran (Account Statement)

Periode : From 01 December 2020
To 31 December 2020
Account No : 1760000874071 - RPL 127 STPI CURUG U
Currency : IDR
Branch : KCP Tangerang Curug

<i>Date & Time</i>	<i>Value Date</i>	<i>Description</i>	<i>Reference No.</i>	<i>Debit</i>	<i>Credit</i>	<i>Balance</i>
29/12/2020 17:00:45	29/12/2020	SEWA BANGUNAN AN AGUS SALIM MCM InhouseTrf DARI FERI SATRIA WIBAWA	SALIM	0.00	9,800,000.00	1,204,437,001.11
30/12/2020 09:41:49	30/12/2020	CK 505671-HI 505671 Transfer 00505671		1,129,762,000.00	0.00	74,675,001.11
31/12/2020 23:59:00	31/12/2020	Bunga		0.00	2,602,673.59	77,277,674.70

No of Credit	17
Total Amount Credited	3,143,409,673.59
No of Debit	3
Total Amount Debited	5,641,693,707.00
Closing Balance	77,277,674.70



ACCOUNT STATEMENT

SEKOLAH TINGGI
JL RAYA CURUG TANGERANG
INDONESIA

Account No. : 2312201542 - RPL 127 STPI utk Dana
Account Type : Current
Period : 01-Dec-20 - 31-Dec-20
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							1,092,026,217.00
29/12/2020 13.57.53	29/12/2020 13.57.53	TANGERAN G	604319	TARIK CHQ CT623095 DESI HARMASITA/087808158320	885,069,067.00	D	206,957,150.00
29/12/2020 14.00.24	29/12/2020 14.00.24	TANGERAN G	667501	TARIK CHQ CT623094 DESI HARMASITA/087808158370	6,995,660.00	D	199,961,490.00
31/12/2020 00.00.00	31/12/2020 00.00.00	INTERNAL BRANCH	927453	JASA GIRO/BUNGA	997,284.00	K	
Ending Balance :							200,958,774.00
Total Debet : 2			892,064,727.00				
Total Credit : 1			997,284.00				

BRANCH : 00043 TANGERANG
 FIXED DEPOSIT TRANSACTION REPORT
 ACCOUNT NO : 00043-01-40-011058-6
 SHORT NAME : RPL 127 BLU STPI
 PRODUCT : Dep t Bln Pem
 TRAN DATE FROM : 1/12/20 TO : 31/12/20
 RECEIPT SERIAL NO: 1907795

POSTING DATE	EFFECTIVE DATE	SEQ/CHEQUE NO	SOURCE CODE	TRAN CODE	TRAN DESC	INTEREST RATE	TRAN AMOUNT	BALANCE
19/12/20	19/12/20	0000000000		170	Pembayaran bunga deposito	.0000	10,670,187.36	2,596,412,263.00
19/12/20	19/12/20	0000000000		411	Transfer bunga	.0000	10,670,187.36	2,596,412,263.00
19/12/20	19/12/20	0000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	.0000	.00	2,596,412,263.00
19/12/20	19/12/20	0000000000		151	Perubahan suku bunga	4.7500	.00	2,596,412,263.00

* End of Report *



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1268/KM.05/2015

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA CURUG
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;

b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: KU.202/81/17Phb-2015 tanggal 9 Juni 2015 telah mengajukan permohonan agar Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;

c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-06/Tim-Penilai/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menciptakan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA CURUG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

PERTAMA : Menetapkan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh).

KEDUA : Status BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan yang telah berstatus BLU secara Penuh wajib menyusun sistem akuntansi, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEEMPAT** : Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyusun dan menyampaikan usulan tarif layanan dan remunerasi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang mencracpkan PK-BLU.
- KELIMA** : Dalam hal Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Menteri Keuangan dapat meninjau status penerapan PK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Menteri Perhubungan;
 3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 6. Direktur Jenderal Perberdaharaan, Kementerian Keuangan;
 7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
 8. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
 9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
 10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
 11. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perberdaharaan, Kementerian Keuangan;
 12. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
 13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perberdaharaan Provinsi Bantén, Direktorat Jenderal Perberdaharaan, Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

14. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug, Kementerian Perhubungan;
15. Kepala Kantor Pelayanan Perberdaharaan Negara Tangerang, Direktorat Jenderal Perberdaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bureaup

Kepala Bagian TU Kementerian



GIARY
NIP 195907291334021001



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KP. 1074 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PADA SATKER PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (STPI) CURUG BPSDM PERHUBUNGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN

- Membaca** : Surat Menteri Keuangan Nomor SR-524/MK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Persetujuan Dewan Pengawas pada 7 (tujuh) BLU di Lingkungan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan;
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan BPSDM Perhubungan, maka perlu dilakukan pembentukan dan penetapan terhadap anggota Dewan Pengawas pada Satker Badan Layanan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug BPSDM Perhubungan.
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut huruf a;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu pembentukan dan penetapan anggota Dewan Pengawas pada Satker Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug BPSDM Perhubungan dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1268/KMK.05/2015 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016, tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 112 Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Sementara pada 7 (tujuh) satker BLU di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PADA SATKER PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (STPI) CURUG BPSDM PERHUBUNGAN

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang terdiri dari Ketua dan Anggota Dewan Pengawas pada Satker Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug BPSDM Perhubungan.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada **Diktum PERTAMA** bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada **Diktum KEDUA**, Dewan Pengawas berkewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Satker PK-BLU;

b. Melaporkan

- b. Melaporkan kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Satker PK-BLU;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Satker PK-BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Satker PK-BLU;
- d. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Satker PK-BLU dalam melaksanakan pengelolaan Satker PK-BLU; dan
- e. Memberikan masukan, saran atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja Satker PK-BLU kepada Pejabat Pengelola Satker PK-BLU

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Satker PK-BLU Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Satker PK-BLU pada tahun bersangkutan;
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 13 Desember 2017



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Pengemb. SDM Perhubungan;
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan;
6. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug;
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KP. 1074 TAHUN 2017
Tanggal : 13 Desember 2017

DAFTAR NAMA PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN DEWAN PENGAWAS
SATKER PK-BLU SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (STPI) CURUG
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

Nama Satker BLU	Nama	Jabatan	Unsur	Masa Jabatan sampai dengan
Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug	Muhammad Anto Julianto, S.E., M.Si., Ak., CA.	Ketua	Kementerian Perhubungan	November 2022
	Ir. Yudhi Sari Sitompul, MM.	Anggota	Tenaga Ahli	
	Fahma Sari Fatma, S.E., Ak, MSE	Anggota	Kementerian Keuangan	


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
BUDI KARYA SUMADI



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 240 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

MENTERI PERHUBUNGAN

- Membaca : Surat Menteri Keuangan Nomor: S-124/MK.5/2020 tanggal 8 September 2020 perihal Penggantian Dewan Pengawas Unsur Kementerian Keuangan pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Dewan Pengawas BLU dari unsur Kementerian Keuangan, maka perlu dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut huruf a;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan penggantian anggota Dewan Pengawas Unsur Kementerian Keuangan pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1268/KMK.05/2015 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.1074 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Satker PK-BLU Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Badan Pengembangan SDM Perhubungan

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS UNSUR KEMENTERIAN KEUANGAN BLU POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (tiga) Lampiran Keputusan ini, sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada **Diktum PERTAMA**, segera melakukan serah terima jabatan dengan pegawai sebagaimana dimaksud pada **Diktum KEDUA**, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Masa kerja

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Dewan Pengawas Pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 15 September 2020



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan;
6. Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor : KM. 240 TAHUN 2020

Tanggal : 15 September 2020

PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS UNSUR KEMENTERIAN KEUANGAN
BLU POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Nama Satker BLU	Nama, Pangkat, Jabatan, dan Alamat		Masa Jabatan
	Dibebastugaskan / Diberhentikan	Ditunjuk / Diangkat	
(1)	(2)	(3)	(4)
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	<u>Kementerian Keuangan</u> Fahma Sari Fatma Anggota Dewan Pengawas Politeknik Penerbangan Indonesia Curug	<u>Kementerian Keuangan</u> <i>Ex Officio</i> Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten Anggota Dewan Pengawas Politeknik Penerbangan Indonesia Curug	Masa Berakhir Jabatan Keanggotaan Dewan Pengawas (s.d Nov 2022)



MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JL. RAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp. (021) 598-2203/04/05
Fax. (021) 598-2234

email : ppi@ppicurug.ac.id
website : [www://ppicurug.ac.id](http://www.ppicurug.ac.id)

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
NOMOR. : *Sk. 177 Tahun 2020*

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN
INDONESIA CURUG NOMOR SK 61 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA ANGGARAN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug perlu merubah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
- b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap serta memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut huruf a.
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 31 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.20 Tahun 2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran dilingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG NOMOR SK 61 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG TAHUN ANGGARAN 2020.

- PERTAMA** : Merubah susunan Pejabat Pengelola Anggaran, sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat keputusan kuasa pengguna anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug tahun anggaran 2020 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curug-Tangerang
ada tanggal : 10 FEB 2020

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**



Capt. AVIRIANTO S., S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651120 199003 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
3. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan
4. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara
5. Kepala KPPN Tangerang

Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPI Curug

Nomor : Sk. 177 Tahun 2020

Tanggal : 10 FEB 2020

**PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Capt. AVIRIANTO S., S.Pd., MM NIP.19651120 199003 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	RUDY KUSTIYONO, SE NIP. 19810111 200604 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
3.	MIRANI PUSPITA VERBASARI, A.Md NIP. 19800110 200604 2 001	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran
4.	ABAS, SE., MA NIP.19680822 198903 1 003	Pembina (IV/a)	Bendahara Penerimaan
5.	DIAN ANGGRAINI P, SE., MT NIP.19850304 201012 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**



Capt. AVIRIANTO S., S.Pd., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651120 199003 1 001

Lampiran II Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPI Curug
Nomor : sk. 177 Tahun 2020
Tanggal : 10 FEB 2020

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2020

1. **Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar** melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan memiliki tugas :
 - a. Menguji kebenaran surat permintaan pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung.
 - b. Menolak dan mengembalikan surat permintaan pembayaran (SPP), apabila surat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 - c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan
 - d. Menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.
 - f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada kuasa pengguna anggaran
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

2. **Bendaharan Pengeluaran** dalam pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang persediaan meliputi :
 - a. Menerima dan menyimpan uang persediaan.
 - b. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan
 - c. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 - e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara
 - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke rekening kas umum negara
 - g. Menatausahakan transaksi uang persediaan.
 - h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan.
 - i. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan.
 - j. Menyampaikan lapran pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN
 - k. Menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

3. **Bendahara pengeluaran pembantu** memiliki tugas :
 - a. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan
 - b. Melakukan penngujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari uang persediaan
 - c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari uang persediaan berdasarkan perintah PPK

- d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 - e. Melakukan pemotongan /pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara.
 - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada kas negara.
 - g. Menatausahakan transaksi uang persediaan
 - h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan
 - i. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan
4. **Bendahara penerimaan** bertugas :
- a. Menerima dan menyimpan uang pendapatan negara
 - b. Menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai ketentuan perundang-undangan
 - c. Menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan kementerian/lembaga/satker
 - d. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara
 - e. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara
 - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG



Capt. AVIRIANTO S., S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651120 199003 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA

P.O. Box 509 Tangerang 15001
Telp. (021) 598-2203 / 2204 / 2205, Fax. (021) 598-2234
e-mail : stpi@stpcurug.ac.id - http://www.stpicurug.ac.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA
NOMOR : SK. 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
NOMOR : SK.2092 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020, maka perlu di tunjuk Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
 - b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap serta memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut huruf a;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 43 Tahun 2000 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2009, tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Departemen Perhubungan berikut perubahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 Tahun 2009 dan perubahan kedua yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 81 tahun 2010;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM.47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
 7. DIPA Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Nomor : SP DIPA-022.12.1.288127/2020, tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG NOMOR SK. 2092 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA CURUG TAHUN ANGGARAN 2020.
- PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, melaksanakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran, untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, memiliki tugas dan wewenang :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan SPP;
 - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dalam hal melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf g, dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahterimakan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan dan bertanggung atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atas paket-paket pengadaan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahkan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KETUJUH : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, dalam hal diperlukan, dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curug - Tangerang

Pada tanggal : 3 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG



Capt. AV. RIANTO S.S.Pd.MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19651120 199003 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Perhubungan;
2. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPI Curug
Nomor : SK. 32 Tahun 2020
Tanggal : 03 JAN 2020

**DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
UNTUK PELAKSANAAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1	EKO BUDI UTOMO, A.Md NIP.19730511 199501 1 001	Penata (III/c)	Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni dan BLU kecuali Short Course
2	ICHYU MACHMIYANA, S.ST., MS.SMA. NIP.19880110 200912 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pejabat Pembuat Komitmen Diklat BLU Short Course dan DPM

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG



Capt. AVIRIANTO S, S.Pd., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19651120 199003 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JL. RAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp. (021) 598-2203/04/05
Fax. (021) 598-2234

email : ppi@ppicurug.ac.id
website : <http://www.ppicurug.ac.id>

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
NOMOR : *SK. 1146 Tahun 2020*

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
TAHUN ANGGARAN 2020 PADA POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya alih tugas atau mutasi pejabat di lingkungan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, perlu untuk ditunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang baru;
 - b. bahwa pejabat yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap serta memenuhi syarat untuk memangku jabatan sebagaimana tersebut huruf a;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.20 Tahun 2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAHUN ANGGARAN 2020 PADA POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sebagaimana tercantum pada kolom 3 Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini, dengan disertai ucapan terima kasih selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pejabat sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2020 pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.

KETIGA : Atasan langsung selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA adalah Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2020, segera setelah ditetapkan Keputusan ini, Pejabat Pembuat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA, agar mengambil langkah-langkah pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2020.

- KELIMA : Dalam menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance* dan *good corporate governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curug-Tangerang
Pada tanggal : 08 SEP 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG



BOEDI PRIHANDONO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661218 199203 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
4. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
5. Kepala KPPN Tangerang.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPI Curug
Nomor : SK. 1146 Tahun 2020
Tanggal : 08 SEP 2020

PEMBERHENTIAN PPSPM TAHUN ANGGARAN 2020 PADA
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

No	Nama Satuan Kerja	Semula	Menjadi	KPPN
1	2	3	4	5
1	Politeknik Penerbangan Indonesia Curug	NAMA : RUDY KUSTIYONO,SE PANGKAT/GOL : Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19810111 200604 1 002 JABATAN : Kasubbag Keuangan & Pengelolaan BMN	NAMA : KURNIA DJUPRIANTO,SE.,M.Ak PANGKAT/GOL: Penata (III/c) NIP. 19780427 200812 1 001 JABATAN : Kasubbag Keuangan & Pengelolaan BMN	Tangerang

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG



BOEDI PRINANDONO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19661218 199203 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811303, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : Kp 911 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEMENTARA PADA SATUAN KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya pejabat definitif pada Satuan Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, dan untuk melaksanakan kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 serta dengan memperhatikan Surat Kepala BPSDMP Nomor: KU 401/ 1/11 set BPSDMP-2020 tanggal 7 Agustus 2020 perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sementara Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, diperlukan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Sementara sebagai penanggung jawab kegiatan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Sementara pada Satuan Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEMENTARA PADA SATUAN KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG.**
- PERTAMA** : Mengangkat **Sdr. Drs. BOEDI PRIHANDONO, M.Si.** Pangkat/ Golongan: Pembina Tk I (IV/b), NIP 19661218 199203 1 001, Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat BPSDM Perhubungan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Sementara pada Satuan Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug .
- KEDUA** : Atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sementara sebagaimana tersebut dalam Diktum **PERTAMA** adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020, segera setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini, Kuasa Pengguna Anggaran Sementara sebagaimana tersebut dalam Diktum **PERTAMA**, agar mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Sementara sebagaimana tersebut dalam Diktum **PERTAMA** juga ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Barang dan sebagai Penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang.

- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 12 Agustus 2020

a.n. **MENTERI PERHUBUNGAN**
Sekretaris Jenderal,



DJOKO SASONO

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19630925 199003 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala BPSDM Perhubungan;
5. Kepala Biro Perencanaan, Setjen Kemenhub;
6. Kepala Biro Keuangan, Setjen Kemenhub;
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : SK. 496 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ATAS NAMA SAUDARA**

ASRI SANTOSA, S.T., S.SI.T., M.T., NIP. 19710706 199301 1 001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk kepentingan dinas dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 47 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan ASRI SANTOSA, S.T., S.SI.T., M.T., NIP. 19710706 199301 1 001 sebagai Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;

7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 47 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003, tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 491 Tahun 2021 Tanggal 12 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Akademik/ Fungsional Dosen atas nama ASRI SANTOSA, S.T., S.SI.T., M.T., NIP. 19710706 199301 1 001;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ATAS NAMA SAUDARA ASRI SANTOSA, S.T., S.SI.T., M.T., NIP. 19710706 199301 1 001.

- PERTAMA** : Memberhentikan Saudara ASRI SANTOSA, S.T., S.S.I.T., M.T., NIP. 19710706 199301 1 001, dari Jabatan Direktur Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara ASRI SANTOSA, S.T., S.S.I.T., M.T., NIP. 19710706 199301 1 001, Jabatan Dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dengan tugas memimpin pelaksanaan tugas Akademi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sesuai Peraturan Perundang-undangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 12 Maret 2021

MENTERI PERHUBUNGAN



BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Perbendaharaan Negara;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG

Jl. TMP. Taruna No.12, Tangerang Banten, 15118
Email: kppn.tangerang@gmail.com Telepon : (021) 5514899 Faksimile : (021) 5533725

Nomor : S- 83 /WPB.11/KP.127/2016
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening
Atas Nama STPI

08 Januari 2016

Yth. KPA Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia
Tangerang

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/lembaga/Satker dan Surat Saudara tanggal 08 Januari 2016 Nomor : KU.310/1/1/STPI-2016, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening untuk keperluan menampung seluruh penerimaan yang bersumber dari PNBPN BLU pada PT BNI Cabang Tangerang, Rekening tersebut **akan diberi nama : RPL 127 STPI utk BLU**. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut
 - a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga/Satker
 - d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN/Kuasa BUN

*Terima kasih untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun
Atas layanan yang kami berikan*

3. Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2016.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor


Sofia Rita Diana
NIP 196401071984032001

Tembusan :

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Banten

*Terima kasih untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun
Atas layanan yang kami berikan*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG

Jl. TMP. Taruna No.12 , Tangerang Banten, 15118
Email: kppn.tangerang@gmail.com Telepon : (021) 5514899 Faksimile : (021) 5533725

Nomor : S- 878 /WPB.11/KP.127/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening
Atas Nama STPI

04 Agustus 2017

Yth. KPA Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)
PO BOX 509
Tangerang 15001

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker dan Surat Saudara tanggal 31 Juli 2017 Nomor : KU.310/I/8/STPI-2017 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang STPI Curug untuk keperluan menampung dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU dan akan diberi nama :

- **RPL 127 STPI Curug utk Dana Kelolaan**

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut
 - a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga/Satker.
 - d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN/Kuasa BUN
3. Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal **24 Agustus 2017**.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Mohamad Yusuf Salim
NIP. 196507241986031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
2. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Banten.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
4. Pimpinan Bank Mandiri Cabang STPI Curug.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG

Jl. TMP. Taruna No.12, Tangerang Banten, 15118
Email: kppn.tangerang@gmail.com Telepon : (021) 5514899 Faksimile : (021) 5533725

Nomor : S- 877/WPB.11/KP.127/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening
Atas Nama STPI

04 Agustus 2017

Yth. KPA Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)
PO BOX 509
Tangerang 15001

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker dan Surat Saudara tanggal 31 Juli 2017 Nomor : KU.310/I/8/STPI-2017 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang STPI Curug untuk keperluan menampung dana yang bersumber dari APBN dan akan diberi nama :

- **BPg 127 STPI Curug**

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut
 - a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga/Satker.
 - d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN/Kuasa BUN
3. **Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017.**

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Mohamad Yusuf Salim
196507241986031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Banten
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
4. Pimpinan Bank Mandiri Cabang STPI Curug.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG

Jl. TMP. Taruna No.12 , Tangerang Banten, 15118
Email: kppn.tangerang@gmail.com Telepon : (021) 5514899 Faksimile : (021) 5533725

Nomor : S- 881/WPB.11/KP.127/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening
Atas Nama STPI

04 Agustus 2017

Yth. KPA Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)
PO BOX 509
Tangerang 15001

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker dan Surat Saudara tanggal 31 Juli 2017 Nomor : KU.310/I/8/STPI-2017 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang STPI Curug untuk keperluan menampung dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU dan akan diberi nama :

- RPL 127 STPI Curug utk Operasional Penerimaan

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut
 - a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga/Satker.
 - d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN/Kuasa BUN
3. Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih..

A.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Mohamad Yusuf Salim y
196507241986031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.
2. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Banten.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
4. Pimpinan Bank Mandiri Cabang STPI Curug.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG

Jl. TMP. Taruna No.12 , Tangerang Banten, 15118
Email: kppn.tangerang@gmail.com Telepon : (021) 5514899 Faksimile : (021) 5533725

Nomor : S- 880 /WPB.11/KP.127/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening
Atas Nama STPI

04 Agustus 2017

Yth. KPA Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)
PO BOX 509
Tangerang 15001

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker dan Surat Saudara tanggal 31 Juli 2017 Nomor : KU.310//8/STPI-2017 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang STPI Curug untuk keperluan menampung dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU dan akan diberi nama :

- **RPL 127 STPI Curug utk Operasional Belanja**

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut
 - a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga/Satker.
 - d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN/Kuasa BUN
3. Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Mohamad Yusuf Salim y
NIP 196507241986031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.
2. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Banten.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
4. Pimpinan Bank Mandiri Cabang STPI Curug.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG

Jalan TMP Taruna Nomor 12, Tangerang, Banten-15118
Email: kppn.tangerang@gmail.com Telepon : (021) 5514899 Faksimile : (021) 5533725

Nomor : S- ~~Agg~~/WPB.11/KP.02/2019

20 Mei 2019

Sifat : Segera

Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
An. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia

→ Yth. KPA Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia
Tangerang

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara tanggal 08 Mei 2019 Nomor KU.310/I/6/STPI-2019 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada Bank BTN KCU Tangerang untuk keperluan menampung dana remunerasi pada STPI Curug. Rekening tersebut akan diberi nama :

- **RPL 127 BLU STPI UNTUK PKD**

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

2. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan.
- b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- c. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
- d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.

e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.

3. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :

- a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini.
- b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening.
- c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan
- d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN
- e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Tembusan :

1. Pimpinan Bank BTN KCU Tangerang
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG

Jalan TMP Taruna Nomor 12, Tangerang, Banten-15118
Email: kppn.tangerang@gmail.com Telepon : (021) 5514899 Faksimile : (021) 5533725

Nomor : S-498/WPB.11/KP.02/2019

20 Mei 2019

Sifat : Segera

Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
An. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia

→ Yth. KPA Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia
Tangerang

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara tanggal 08 Mei 2019 Nomor KU.307//I/6/STPI-2019 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tangerang untuk keperluan menampung dana idle cash yang berasal dari saldo awal BLU. Rekening tersebut akan diberi nama :

- RPL 127 BLU STPI UNTUK PKD

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

2. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan.
- b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- c. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
- d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.

- e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
3. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
- a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN
 - e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Mohamad Yusuf Salim 4

Tembusan :

1. Pimpinan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Tangerang
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia